

RENCANA STRATEGIS 2013 – 2018



DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jalan Pendreh Km.1 Telp. (0519)-22771-21704-21019 Fax.0519-22328
Muara Teweh- Kalimantan Tengah 73811

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara periode 2013-2018.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan program-program serta sasaran pembangunan sektor infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman serta penataan ruang yang berlaku untuk wilayah Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya program-program yang tertuang dalam Renstra akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara untuk setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara untuk periode 5 (lima) tahunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik serta tanggapan yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga perencanaan ini dapat berfungsi untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam kita membina dan melayani masyarakat sehingga pembangunan di wilayah Kabupaten Barito Utara dapat tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita serta meridhoi segala tugas pengabdian yang kita berikan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Muara Teweh, 20 Oktober 2014

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Barito Utara,

H.FERY KUSMIADI, SE,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641124 198703 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	10
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	 12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	12
2.2. Sumber Daya SKPD	20
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD	47
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	 52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	52
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	53
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	54
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	61
 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	 63
4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum	63
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	66
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	69

BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	74
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	78
BAB VII	PENUTUP	81
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional	19
Tabel 3	Kondisi Mebeleur Kantor	20
Tabel 4	Kondisi Kendaraan Dinas Operasional	20
Tabel 5	Kondisi Peralatan Kantor	20
Tabel 6	Kondisi Perlengkapan Kantor	21
Tabel 7	Kondisi Alat-alat Berat, Peralatan Persampahan, Peralatan Pertamanan	22
Tabel 8	Alat-alat Ukur, bengkel, Laboratorium dan Pemetaan	22
Tabel 9	Dokumen Perencanaan	23
Tabel 10	Jaringan Jalan Strategis (JJS) di Kabupaten Barito Utara	32
Tabel 11	Daftar Inventarisasi Jalan Kabupaten	33
Tabel 12	Gambaran Umum Jembatan di Kabupaten Barito Utara.....	38
Tabel 13	Sungai yang masih Dapat Dilayari di Kab. Barito Utara	40
Tabel 14	Jaringan Irigasi dan Rawa di Kabupaten Barito Utara	41
Tabel 15	Saluran, Bangunan dan Jalan Inspeksi Jaringan Irigasi dan Rawa di Kabupaten Barito Utara	42
Tabel 16	Timbunan Sampah Berdasarkan Sumber Sampah	45
Tabel 17	Rencana Lokasi Penempatan Pewadahan Komunal (TPS) Sampah	45
Tabel 18	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih di daerah merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya ditanggapi oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala.

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD dengan membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan organisasi didalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi.

Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Renstra SKPD Dinas Pekerjaan

Umum ini disusun sebagai dokumen perencanaan dan menjadi pedoman utama dalam upaya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman diseluruh Kabupaten Barito Utara. Dalam dokumen ini dituangkan visi, misi, tujuan, kebijakan kabupaten, program-program serta sasaran pembangunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berlaku untuk Kabupaten Barito Utara.

Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan *teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel dan konsisten dengan rencana lainnya yang relevan. Sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum diupayakan dilakukan secara transparan dengan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak maupun para stakeholders terkait lainnya. Hal ini dilakukan dengan harapan adanya masukan dari berbagai pihak dalam perumusan Renstra pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, sehingga dapat mendorong partisipasi dari masyarakat luas yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab bersama dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Jabaran operasional Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara adalah suatu dokumen perencanaan sektoral yang berskala daerah yang disusun secara sistematis dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terkandung dalam RPJM Daerah Barito Utara serta dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJM Nasional. Dalam upaya perbaikan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman di Kabupaten Barito Utara, Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis perencanaan sektoral seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta melalui

proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

Dalam kaitannya dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Fungsi Renstra adalah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit dibawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja dibawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi selama kurun waktu 2013-2018 dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara mengandung nilai yang strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, antara lain :

a). Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Penyediaan sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan sumber daya yang strategis, Dinas Pekerjaan Umum dapat membangun strateginya sebagian bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b). Diperlukan untuk mengantisipasi globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan daerah, semakin menipisnya sumber daya, semakin

beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya sumber daya yang strategis, Dinas Pekerjaan Umum dapat menyiapkan perubahan secara proaktif dan bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

c). Berorientasi pada masa depan

Sumber daya yang strategis memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang. Sumber daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara menyeluruh, untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d). Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil senantiasa menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

- Pelayanan Prima

Pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan dalam era globalisasi saat ini. Disamping itu dalam era keterbukaan, masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan masyarakat dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhannya.

- **Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih**

Guna mewujudkan pemerintahan yang baik, perencanaan strategis harus mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pula. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel, baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek penyalahgunaan wewenang yang mengarah kepada KKN.

Hubungan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 adalah Renstra Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu berupa program SKPD Dinas Pekerjaan Umum, program lintas SKPD dan program lintas wilayah.

Tahapan langkah penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

- a). Mengkaji visi, misi dan program sesuai dengan RPJMD Kabupaten Barito Utara kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara.
- b). Melakukan identifikasi terhadap capaian kinerja program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara sampai dengan tahun 2018.

- c). Melakukan perumusan visi, misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara untuk jangka waktu 2013 – 2018 dengan memperhatikan hasil pada point (a) dan (b).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun kedepan yang berhubungan dengan proses perencanaan dan pengendalian program pembangunan infrastruktur sehingga tercipta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergisitas dalam perencanaan daerah;

2. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara;
3. Mempermudah pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan arah dan pedoman serta sebagai acuan resmi dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Sebagai kerangka dasar pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan SKPD daerah;
4. Mendukung koordinasi antar pelaku yang berkaitan dengan Infrastruktur.
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara hakekatnya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tertentu di bidang pekerjaan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah, meliputi bidang Administrasi, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Kota, Tata Ruang, serta Peralatan dan Perbekalan (Alkal).

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perizinan di

- bidang pekerjaan umum, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik pemerintah daerah dan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
 - c. Pelaksanaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan umum Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Pengelolaan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Dinas Pekerjaan Umum Barito Utara.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara, maka Susunan organisasi terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbag. Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
- b. Subbag. Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategik, rencana kinerja tahunan dan LAKIP Dinas.
- c. Subbag. Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan dinas.

3. Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan teknis, survey, pengawasan, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan, peningkatan/penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

4. Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Cipta Karya yang meliputi pengelolaan perizinan bangunan, perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan perumahan dan pemukiman serta penyehatan lingkungan.

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

- a. Seksi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan rencana dan pengawasan program kerja penataan dan pendataan gedung pemerintah, rumah dinas lingkungan dan perumahan lainnya.
 - b. Seksi Perumahan dan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan segala usaha yang berkenaan dengan penyehatan lingkungan dan air bersih.
5. Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan pengairan, operasi dan pemeliharaan, penambangan bahan galian golongan C dan pengamanan pemanfaatan air permukaan.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

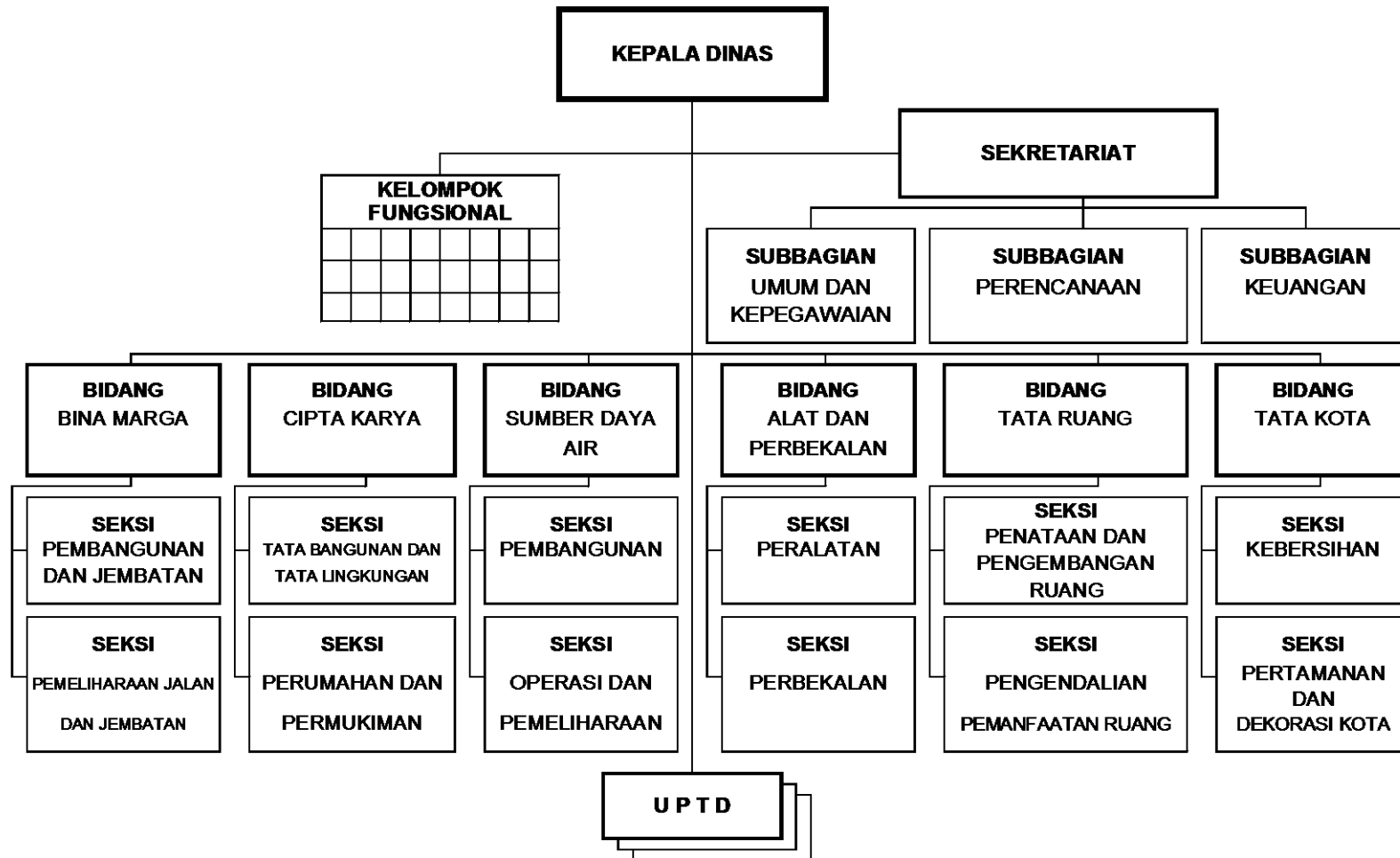
- a. Seksi Pembangunan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan pengamanan pengairan serta penambangan bahan galian golongan C.

- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoperasian, pelaksanaan program serta pemeliharaan pengairan.
- 6. Bidang Alat dan Perbekalan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Alat dan Perbekalan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penggunaan dan pengelolaan peralatan, perumusan besarnya sewa dan standar sewa, pengadaan alat suku cadang, bahan bakar dan pelumas, perbaikan, pemeliharaan, perawatan dan penentuan kondisi peralatan yang layak dioperasikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Peralatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Peralatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengaturan dan menetapkan standar sewa, penggunaan peralatan dan pengawasan penggunaannya serta menentukan kondisi layaknya pengoperasian peralatan.
 - b. Seksi Perbekalan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana program kerja perbekalan yang meliputi inventarisasi peralatan suku cadang, bahan bakar dan pelumas.
- 7. Bidang Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang tata ruang, kegiatan penyusunan, perencanaan dan pengawasan serta pemanfaatan tata ruang kabupaten, terdiri dari
 - a. Seksi Penataan dan Pengembangan Ruang yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana penataan dan pengembangan ruang.

- b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan, pengendalian pemanfaatan ruang.
- 8. Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kota yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan kota, bangunan, pertamanan, kebersihan dan keindahan kota, terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan dipimpin oleh Kepala Seksi Kebersihan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan perencanaan pola induk kebersihan kota dan melaksanakan kegiatan perumusan rencana dan program kerja penataan kebersihan lingkungan dan kota.
 - b. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota dipimpin oleh Kepala Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan pengaturan pertamanan dan dekorasi kota sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas, dalam hal ini berupa Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



b. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara sampai dengan Bulan Juni 2014 sebanyak 148 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tingkat pendidikan dan pangkat/ golongan Aparatur Sipil Negara di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1: Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.II	D.III	S-1	S-2	Jumlah
1	IV	-	-	-	-	-	1	3	4
2	III	-	-	18	-	5	45	5	74
3	II	-	4	39	-	6	-	-	49
4	I	1	4	-	-	-	-	-	5
5	PTT/ Honorer	4	2	10	-	-	-	-	16
Jumlah		5	10	67	-	11	46	8	148

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2014, s.d Juni 2014

Tabel 2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional

No.	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	6
4	Eselon IV.a	16
5	Eselon IV.b	1
6	Fungsional	-
7	Staf/Pelaksana	123
Jumlah		148

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2014, s.d Juni 2014

2.2. Sumber Daya SKPD

Peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3: Kondisi Mebeleur Kantor

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	kursi besi/ metal	227	buah	100		
2	kursi kayu	38	buah	80	20	
3	meja rapat	1	set	100		
4	kursi tamu	1	set	100		
5	kursi putar	17	buah	100		
6	kursi lipat	163	buah	100		
7	meja komputer	3	buah	100		
8	meja biro	173	buah	100		
9	meja kerja	23	buah	100		
10	Sofa	6	set	100		
11	kursi kerja	51	buah	100		
12	lemari penyimpanan	18	buah	100		
13	lemari besi	23	buah	100		
14	filling besi/metal	32	buah	100		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2013

Tabel 4: Kondisi Kendaraan Dinas Operasional

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Mobil (jeep)	2	unit	50	50	
2	sepeda motor	22	unit	100		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2013

Tabel 5: Kondisi Peralatan Kantor

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	mesin tik manual	5	buah	100		
2	mesin hitung manual	2	buah	100		
3	Stabilisator	6	b uah	100		
4	camera digital	32	buah	100		
5	handy cam	6	buah	100		

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
6	internet (antena + wireless acces point)	1	set	100		
7	komputer PC	44	unit	100		
8	Laptop	14	buah	100		
9	Notebook	17	buah	100		
10	ploter A0	1	buah	100		
11	hardisk eksternal	8	buah	100		
12	Printer	56	buah	67,86	32,14	
13	Scanner	1	buah	100		
14	komputer server	3	unit	100		
15	UPS	16	buah	87,50	12,50	
16	Proyektor	2	buah	100		
17	layar proyektor	1	buah	100		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2013

Tabel 6: Kondisi Perlengkapan Kantor

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	brand kas	1	buah	100		
2	papan visual	2	buah	100		
3	white board	1	buah	100		
4	mesin absensi	3	unit	66,67	33,3	
5	alat pemotong kertas	1	buah	100		
6	mesin pompa air	3	buah	100		
7	Gorden	100	meter	100		
8	jam mekanis	8	buah	100		
9	lemari es	1	unit	100		
10	AC split	38	unit	94,74	5,26	
11	kipas angin	6	buah	100		
12	Televisi	1	unit	100		
13	Wireless	2	unit	100		
14	Dispenser	3	buah	100		
15	alat pemadam portable	6	unit	100		
16	mesin jilid	1	buah		100	
17	Telephone	2	buah	100		
18	Faxcimile	1	buah	100		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2013

Tabel 7: Kondisi Alat-Alat Berat, Peralatan Persampahan, Peralatan Pertamanan

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	motor grader	4	unit	75	25	
2	Buldozer	4	unit	75	25	
3	wheel excavator	1	unit	100		
4	dump truck	15	unit	73	27	
5	asphal sprayer	1	unit	100		
6	macadam roller/three whell roller	8	unit	87,5	12,5	
7	vibration roller	1	unit	100		
8	tyre roller	1	unit		100	
9	Stamper	5	unit	100		
10	stone crusher	2	unit	100		
11	concrete mixer	1	unit	100		
12	concrete vibrator	3	unit	33,3	66,7	
13	wheel loader	3	unit	33,3	66,7	
14	transportable compresor	1	unit	100		
15	overhead crane	1	unit	100		
16	pemadat sampah	1	unit	100		
17	pengayak sampah	1	unit	100		
18	Amroll truck	1	unit	100		
19	bak truck amroll	2	buah	100		
20	tempat sampah (drum)	101	buah	90	10	
21	bak sampah profil	98	buah	100		
22	mesin pencacah sampah	2	unit	100		
23	Penyemprot tangan	8	buah	100		
24	mesin potong rumput	17	buah	100		
25	kontainer sampah	2	buah	100		
26	Kendaraan roda tiga	6	unit	100		
27	mobil tangki	1	unit	100		
28	pick up	4	unit	75	25	

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2013

Tabel 8: Alat-Alat Ukur, Bengkel , Laboratorium dan Pemetaan

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Perkasas bengkel kerja	1	Set	100		
2	alat ukur debit air	1	Unit	100		
3	mistar ukur air	3	Buah	100		
4	Global Positioning System (GPS)	8	Buah	100		

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
5	alat ukur kadar air	1	Unit	100		
6	Timbangan	2	Buah	100		
7	alat uji beton	1	Unit	100		
8	Peralatan laboratorium	1	Set	100		
9	theodilite (digital)	1	Unit	100		
10	mesin uji mekanik (manual)	1	Set	100		
11	Generator	1	Unit	100		
12	alat potong aspal	2	Unit	100		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2013

Tabel 9: Dokumen Perencanaan

No.	Jenis Dokumen	Jumlah	Satuan	Tahun Pembuatan
1	Buku survey pendataan infrastruktur bidang ke cipta karya	1	Buah	2007
2	Maket (mock-up) master plan Bapertarum PNS	1	Set	2007
3	Buku Teknis ke- PU-an	3	Buah	2008,2010,2012
4	Buku Peta Citra Satelit	1	Set	2010
5	Buku Peraturan Pengadaan barang dan jasa	27	Buah	2013
6	Perencanaan rehabilitasi bangunan eks kantor Dispenda	1	Dokumen	2007
7	Perencanaan pembuatan kolam dan taman samping Pemda	1	Dokumen	2007
8	Perencanaan fasilitas umum Taman Rekreasi Remaja	1	Dokumen	2007
9	Perencanaan pengadaan konstruksi jalan (pembangunan jalan)	1	Dokumen	2007
10	Perencanaan pemeliharaan jalan tahun 2008	1	Dokumen	2007
11	Perencanaan pembangunan jalan tahun 2008	1	Dokumen	2007
12	Perencanaan jalan lingkungan	1	Dokumen	2007
13	Perencanaan pengadaan konstruksi jembatan	1	Dokumen	2007
14	Perencanaan pembangunan jembatan tahun 2008	1	Dokumen	2007
15	Perencanaan pengadaan konstruksi jalan dan jembatan	1	Dokumen	2007
16	Perencanaan rehabilitasi jalan dan	1	Dokumen	2007

No.	Jenis Dokumen	Jumlah	Satuan	Tahun Pembuatan
	jembatan tahun 2008			
17	Perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2008	1	Dokumen	2007
18	Perencanaan pengembangan jaringan irigasi dan rawa & jaringan pengairan lainnya	1	dokumen	2007
19	Perencanaan teknis pembangunan jaringan irigasi	1	Dokumen	2007
20	Rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) bidang CK	1	Dokumen	2008
21	Perencanaan pembangunan jalan tahun 2009	1	Dokumen	2008
22	Perencanaan rehabilitasi jalan dan jembatan	1	Dokumen	2008
23	Perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Dokumen	2008
24	Perencanaan jalan lingkungan	1	Dokumen	2008
25	Perencanaan pembangunan jembatan	1	Dokumen	2008
26	Perencanaan kegiatan pembangunan jembatan tahun 2009	1	Dokumen	2008
27	Perencanaan rehab jalan dan jembatan tahun 2009	1	Dokumen	2008
28	Perencanaan konstruksi jaringan air bersih/ air minum	2	Dokumen	2008, 2009
29	Perencanaan penataan dan pengembangan Kawasan Buper Panglima Batur	1	Dokumen	2009
30	Perencanaan Stadion Km.5 Belakang SMU 2 Muara Teweh (luas lahan 8 Ha)	1	Dokumen	2009
31	Perencanaan DED Kawasan Tepian Sungai Barito (River Front City)	1	Dokumen	2009
32	Perencanaan jalan menuju Bandara Baru dan Jalan-Jalan Strategis	1	Dokumen	2009
33	Perencanaan kegiatan rehab jalan dan jembatan tahun 2010	1	Dokumen	2009
34	Perencanaan pengadaan konstruksi jalan	1	Dokumen	2009
35	Perencanaan Redesign Pembangunan Jembatan KH. Hasan Basri	1	Dokumen	2009
36	Perencanaan pembuatan jembatan tersebar di 6 kecamatan tahun 2010	1	Dokumen	2009

No.	Jenis Dokumen	Jumlah	Satuan	Tahun Pembuatan
37	Perencanaan konstruksi jaringan irigasi	1	Dokumen	2009
38	Perencanaan penanganan Sei Bengaris dan Sei Butong untuk penanganan banjir	1	dokumen	2009
39	Perencanaan pembangunan jalan tahun 2010	1	Dokumen	2010
40	Perencanaan pembangunan gedung KNPI, pembangunan gedung LPTQ, pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran	1	Dokumen	2013
41	Perencanaan peningkatan /pembangunan jalan tahun 2014	1	Dokumen	2013
42	Perencanaan peningkatan/ rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman tahun 2014	1	Dokumen	2013
43	Perencanaan pembangunan jembatan tahun 2014	1	Dokumen	2013
44	Perencanaan pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air tahun 2014	1	Dokumen	2013
45	Perencanaan rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2014	1	Dokumen	2013
46	Perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai tahun 2014	1	Dokumen	2013
47	Perencanaan peningkatan/ pembersihan dan pengerukan sungai/ kali tahun 2014	1	Dokumen	2013
48	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	1	Dokumen	2013
49	Perencanaan pengembangan dan pengelolaan air minum dan air limbah tahun 2014	1	Dokumen	2013

Sumber : KIB C, KIB D, KIB E, KIB F, Tahun 2013

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang secara geografis terletak pada posisi 20°20'3,32" - 115°50'47" Bujur Timur dan 0°49'00" Lintang Utara - 1°27'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas; sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten

Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya.

Luas wilayah Kabupaten Barito Utara berdasarkan data publikasi BPS Barito Utara tahun 2011 adalah 8.300 Km² (830.000 Ha) atau 5,4% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tofografi dan morfologi daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari sebelah selatan ke timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah utara dengan bentuk daerah lipatan. Sedangkan jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barito Utara yaitu *Aluvial* terdapat dialiran sungai, *regosol* menyebar dibagian selatan, *podsolik* merah kuning dengan induk batuan dan batuan beku terdapat di wilayah perbukitan, *kambisol* dan *okisol (laterit)* terdapat di wilayah bagian atas dan paling luas, keadaan bergelombang dan berbukit.

Keadaan klimatologi di Kabupaten Barito Utara pada saat ini, bagian timurnya termasuk daerah beriklim tropis yang lembab dan panas dengan keadaan temperatur udara rata-rata maksimum lebih kurang 32,3°C dan minimum kurang lebih 22,7°C dengan kelembaban nisbi rata-rata 86%.

Sungai utama yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Sungai Barito yang mengalir dari daerah hulu di Kabupaten Murung Raya melewati Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan hingga ke Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalsel. Sungai Barito mempunyai panjang kurang lebih 900 Km (dapat dilayari 780 m) dan lebar rata-rata 650 meter dengan kedalaman 8 meter dan bermuara ke Laut Jawa. Selain itu sungai yang cukup berperan dalam sistem hidrologi di Barito Utara adalah Sungai Montallat, Sungai Teweh dan Sungai Lahei yang merupakan anak Sungai Barito.

Secara administrasi Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Barito Utara, Berdasarkan data Barito Utara Dalam Angka Tahun 2013 Kecamatan Lahei merupakan kecamatan yang paling luas dengan wilayah 14,12% dari luas Kabupaten Barito Utara, sedangkan Kecamatan Teweh Timur paling sempit dengan luas 5,20% dari luas wilayah Kabupaten Barito Utara.

Secara rinci luas masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kecamatan Montallat luasnya 553,00 km² atau 6,66% dari luas Kabupaten Barito Utara
2. Kecamatan Gunung Timang luasnya 890,00 km² atau 10,72% dari luas Kabupaten Barito Utara
3. Kecamatan Gunung Purei luasnya 1.158,00 km² atau 13,95% dari luas Kabupaten Barito Utara
4. Kecamatan Teweh Timur luasnya 432,00 km² atau 5,20% dari luas Kabupaten Barito Utara
5. Kecamatan Teweh Tengah luasnya 1.008 km² atau 12,14% dari luas Kabupaten Barito Utara
6. Kecamatan Lahei luasnya 1.172,00 km² atau 14,12% dari luas Kabupaten Barito Utara
7. Kecamatan Teweh Baru luasnya 1.119,00 km² atau 13,48% dari luas Kabupaten Barito Utara
8. Kecamatan Teweh Selatan luasnya 827,00 km² atau 9,96% dari luas Kabupaten Barito Utara
9. Kecamatan Lahei Barat luasnya 1.141,00 km² atau 13,75% dari luas Kabupaten Barito Utara

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2012 (per 31 Desember 2012) adalah 178.789 jiwa berdasarkan registrasi penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Sensus Penduduk oleh BPS Barito Utara jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 121.573 jiwa, tahun 2011 berjumlah 123.602 jiwa dan tahun 2012 berjumlah 123.781 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata 15 jiwa per kilometer persegi, dengan Kecamatan Teweh Tengah sebagai kecamatan terpadat dan Kecamatan Gunung Purei adalah kecamatan terjarang penduduknya. Persentase jumlah penduduk Barito Utara berkisar 18,10% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Selama kurun waktu tahun 2003-2010 pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Utara terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 1,19% setiap tahunnya. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa *sex ratio* penduduk Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 108, yang artinya penduduk laki-laki di kabupaten ini 8% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuannya.

Berdasarkan gambaran secara umum Kabupaten Barito Utara diatas, dan luasnya wilayah pelayanan di bidang pekerjaan umum yang secara kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara yang mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara saat ini dan bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang serta bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan tersebut.

1. Bidang Bina Marga

Fokus pembangunan untuk pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah. Fokus pembangunan ini ditujukan pada upaya pemeliharaan jalan yang tepat waktu agar kondisi jalan semakin

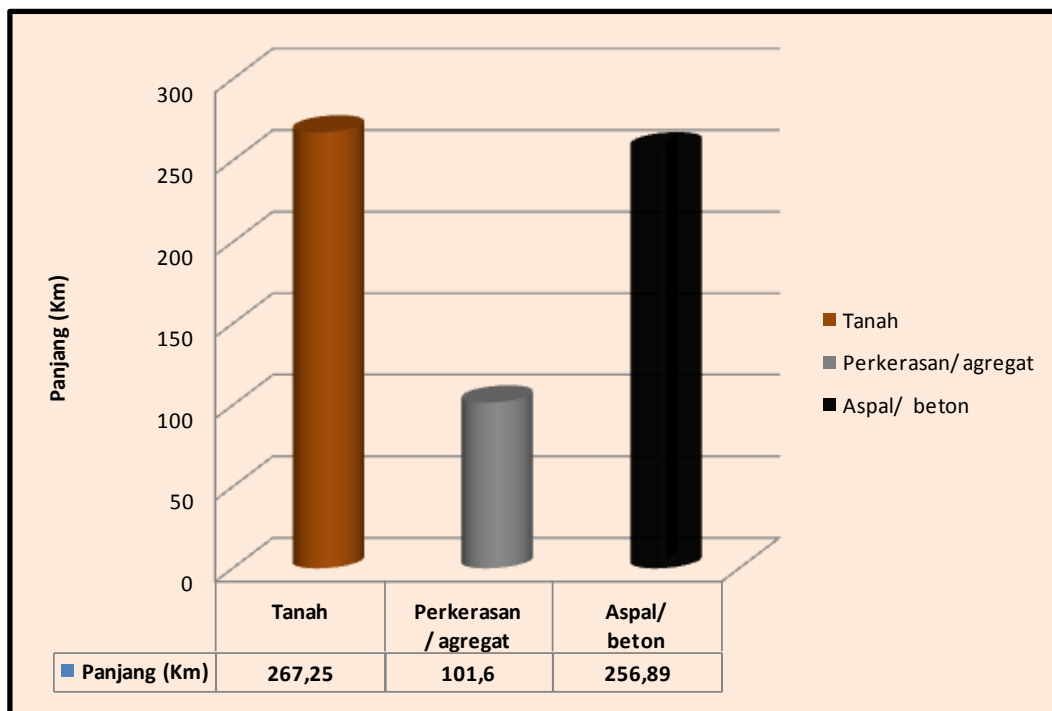
membaik, yang selanjutnya dapat menurunkan biaya perbaikan jalan. Disisi lain, upaya peningkatan jumlah lajur kilometer, yang dilakukan melalui pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru, untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan besaran kendaraan kilometer dan tonase kilometer. Apabila peningkatan ekonomi ini mampu dipenuhi oleh peningkatan kapasitas jalan yang dicerminkan oleh besaran lajur kilometer secara proporsional, maka kecepatan rata-rata kendaraan akan meningkat, sehingga menurunkan biaya ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing daerah.

Dalam penyediaan infrastruktur transportasi jalan di Kabupaten Barito Utara pada waktu mendatang akan menjadi tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum adalah menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan berlebih dan perkembangan permukiman. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau yang disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial dimasyarakat dan pemerintahan. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Sehingga kita harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Barito Utara karena merupakan akses penting yang dapat menjadi tolak ukur pembangunan. Pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung percepatan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan. Laju pertumbuhan ekonomi yang pesat, pertambahan penduduk, dan peningkatan arus urbanisasi merupakan akibat yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada era otonomi daerah

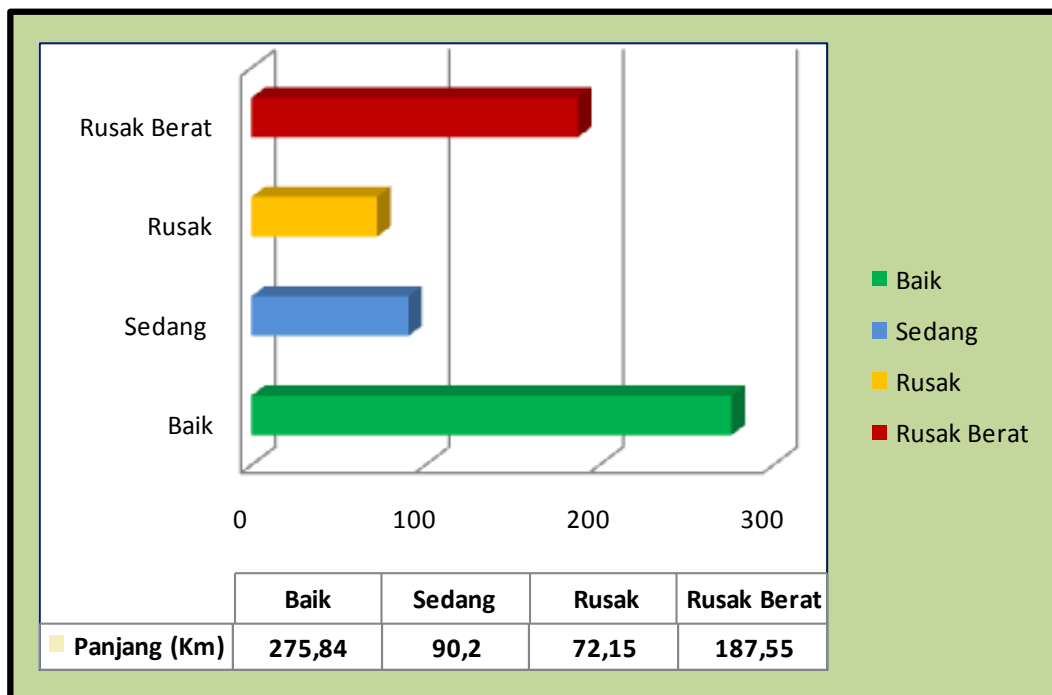
ini. Perkembangan tersebut berdampak pada perubahan tata guna lahan dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Untuk mengantisipasi hal tersebut Kabupaten Barito Utara harus melakukan penyeimbangan jaringan pada sarana dan prasarana utama. Perimbangan dengan penambahan peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten, kecamatan sampai perdesaan yang terintegrasi dengan jaringan jalan negara dan jalan provinsi.

Berdasarkan data Bidang Bina Marga Dinas PU Barito Utara per bulan Juni 2014, menunjukkan total panjang jalan kabupaten telah mencapai 625,74 Km yang terdiri dari 127 ruas jalan. Dari total panjang jalan kabupaten tersebut 42,71% atau 267,25 Km masih berupa jalan tanah dan 16,24 % atau 101,60 Km sudah mendapat perkerasan /agregat serta 41,05% atau 256,89 Km berupa jalan aspal/beton. Sedangkan berdasarkan kondisi jalan dari total panjang tersebut 44,08% dalam kondisi baik atau sepanjang 275,84 Km dan jalan dalam kondisi sedang 14,41% atau 90,2 Km, dalam kondisi rusak ringan 11,53% atau 72,15 Km dan selebihnya dalam kondisi rusak berat 29,97% atau 187,55 Km. Ketidak mantapan kondisi jaringan jalan kabupaten disebabkan oleh kualitas konstruksi jalan yang :belum optimal (tidak terpenuhinya umur rencana jalan), beban berlebih, bencana alam (banjir & longsor) serta genangan air sebagai akibat tidak berfungsinya sistem drainase. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi. Faktor penting lain penyebab kerusakan jalan adalah masih lemahnya pemeliharaan (belum dilakukan sebagaimana mestinya) yang mengakibatkan munculnya genangan air pada badan jalan serta kerusakan permukaan jalan (seperti retak, lubang, bergelombang dan mengelupas) yang tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Namun demikian, faktor air merupakan penyebab utama kerusakan jalan khususnya perkerasan lentur. Air dapat memberi pengaruh dan dampak dalam berbagai kondisi seperti air permukaan, air yang terperung/terjebak dalam konstruksi dan air intrusi dari lapis bawah tanah.

Gambar.1. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan



Gambar 2. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi



Tabel 10. Jaringan Jalan Strategis (JJS) di Kabupaten Barito Utara

No.	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)
1.	Jln Negara Km. 21 – Nihan	9
2.	Jln. Negara Km. 11 – Lahei	7,2
3.	Jln. Trans 52 - Trans 55	12
4.	Jln. Negara Km. 38 – Lokasi Trans 38	6
5.	Jln. Muara Teweh – Trinsing	14
6.	Jln. Negara K. 15 – Hajak	2,7
7.	Jln. Kandui – Tongka	21,2
8.	Jln. Tongka - Batu Raya	18
9.	Jln Kandui – Ketapang	18
10.	Jln. Ketapang – Montallat II	13,6
11.	Jln. Simpang Trans Jamut – Trans Jamut	8
12.	Jln. Simpang Thamrin – Trans Liju	9,2
13.	Jln. Trans Liju – Benangin V	9,8
14.	Jln. Poros Simpang Km. 34 – Desa Gandring	18
15.	Jln. Negara Km. 34 – Simpang Benangin	54
16.	Jln. Poros Trahean tembus Bintang Ninggi – Butong	8
	TOTAL	228,7

Sumber : SK.Bupati Barut No.188.45/169/2013 tentang Penetapan status ruas-ruas jalan kabupaten/kota, jalan lingkungan/desa, jaringan jalan strategis (JJS), Jaringan irigasi dan Rawa di Kabupaten Barito Utara

Tabel 11. Daftar Inventarisasi Jalan Kabupaten

No	No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lebar (m)	Type Permukaan (Km)			Kondisi ((Km)			
					Aspal/ Beton	Agregat	Tanah	Baik	Sedan g	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	001	Jl.Negara Km. 21 – Nihan	9,00	4,00	7,50	1,50	-	8,50	0,50	-	-
2	002	Nihan – Mukut	6,00	4,00	-	6,00	-	6,00	-	-	-
3	003	Lahei – Luwe	11,20	4,00	-	-	11,20	-	-	11,20	-
4	004	Luwe – Bena	9,00	4,00	-	-	9,00	-	-	9,00	-
5	005	Jl. Negara Km. 11 – Lahei	7,20	4,50	7,20	-	-	7,20	-	-	-
6	006	Simp. Lahei – Ipu	0,70	4,00	0,70	-	-	0,70	-	-	-
7	007	Trans 52 - Trans 55	12,00	4,00	12,00	-	-	6,00	4,00	2,00	-
8	008	Jl.Negara Km.52 - Simp. Trans 38	10,90	4,00	10,90	-	-	8,00	2,90	-	-
9	009	Jl.Negara Km.38 - Lokasi Trans 38	6,00	4,00	6,00	-	-	6,00	-	-	-
10	010	Jl. Negara Km. 17 - Lokasi Perkebunan	9,00	4,50	-	-	9,00	-	9,00	-	-
11	011	Jl. Negara Km. 9 - Lokasi Perkebunan	10,40	4,50	-	-	10,40	-	10,40	-	-
12	012	Simp. Bayas – Pendreh	9,30	4,00	9,30	-	-	8,00	-	1,30	-
13	013	Bayas – Mangkulango	1,80	4,50	1,80	-	-	1,80	-	-	-
14	014	Muara Teweh – Malawaken	4,60	4,50	4,60	-	-	4,60	-	-	-
15	015	Simp. Jl. Negara Km. 3,5 – Pangku	0,95	4,00	0,95	-	-	0,95	-	-	-
16	016	Simp. Jl. Benangin – Malawaken	3,60	4,50	3,60	-	-	3,00	0,60	-	-
17	017	Malawaken – Lahei	8,50	4,50	-	-	8,50	-	-	8,50	-
18	018	Muara Teweh – Pendreh	11,00	4,50	11,00	-	-	8,00	2,00	1,00	-
19	019	Pendreh - Lemo II	12,00	4,00	12,00	-	-	-	6,00	6,00	-
20	020	Lemo I - Buntok Baru	17,00	4,50	-	-	17,00	-	-	-	17,00
21	021	Buntok Baru - Camp Daya Sakti	16,00	4,50	-	-	16,00	-	-	-	16,00
22	022	Muara Teweh – Trinsing	14,00	4,00	14,00	-	-	13,00	1,00	-	-
23	023	Simp. Trinsing - Bintang Ninggi	11,00	4,50	11,00	-	-	10,00	1,00	-	-
24	024	Simp. Trinsing - PIR Butong	8,70	4,50	6,10	-	2,60	5,00	2,00	1,70	-
25	025	PIR Butong - Desa Butong	2,30	4,50	1,00	1,30	-	1,00	1,30	-	-

No	No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lebar (m)	Type Permukaan (Km)			Kondisi (Km)			
					Aspal/ Beton	Agregat	Tanah	Baik	Sedan g	Rusak Ringan	Rusak Berat
26	026	Jl. Negara Km. 4 – Lemo	9,00	4,50	4,00	3,00	2,00	6,00	3,00	-	-
27	027	Jl. Negara Km. 15 – Hajak	2,70	4,50	2,70	-	-	2,70	-	-	-
28	028	Hajak - Liang Naga	3,00	4,50	2,00	1,00	-	3,00	-	-	-
29	029	Liang Naga – Sabuh	7,80	4,50	1,00	1,00	5,80	2,00	2,00	3,80	-
30	030	Jl. Negara Km. 3 – Jambu	0,80	4,00	0,80	-	-	0,80	-	-	-
31	031	Jl. Negara Km. 2 – Jambu	0,85	4,00	0,85	-	-	0,85	-	-	-
32	032	Kandui – Tongka	21,20	4,50	21,20	-	-	10,00	7,00	3,00	1,20
33	033	Tongka - Batu Raya	18,00	4,50	-	18,00	-	12,00	6,00	-	-
34	034	Tongka - Simp. Selebes	28,00	4,50	-	-	28,00	-	-	-	28,00
35	035	Kandui – Ketapang	18,00	4,50	18,00	-	-	14,00	4,00	-	-
36	036	Ketapang - Montallat II	13,60	4,50	13,60	-	-	8,00	5,60	-	-
37	037	Montallat II – Sikan	7,00	4,50	-	-	7,00	-	-	-	7,00
38	038	Sikan – Kamawen	12,00	4,50	-	-	12,00	-	-	-	12,00
39	039	Camp. PT. Daya Sakti – Pepas	8,00	4,50	-	-	8,00	-	-	-	8,00
40	040	Pepas - Tumpung Laung II	8,30	4,50	7,00	1,30	-	7,30	1,00	-	-
41	041	Tumpung Laung I - Batas Barsel	12,00	4,50	-	-	12,00	-	-	-	12,00
42	042	Jl. Negara Km. 33 - Simp Selebes	24,30	4,50	-	-	24,30	-	-	-	24,30
43	043	Simp. Trans Jamut - Trans Jamut	8,00	4,50	-	5,00	3,00	3,00	5,00	-	-
44	044	Simp. Selebes - Simp. Trans. Jamut	4,20	4,50	-	-	4,20	-	-	-	4,20
45	045	Lampeong – Lawarang	1,40	4,50	-	-	1,40	-	-	-	1,40
46	046	Lawarang - Muara Mea	5,65	4,50	-	-	5,65	-	-	-	5,65
47	047	Muara Mea - Linon Besi	5,20	4,50	-	-	5,20	-	-	-	5,20
48	048	Payang – Berong	3,15	4,50	0,50	-	2,65	0,50	-	-	2,65
49	049	Berong – Baok	4,90	4,50	-	-	4,90	-	-	-	4,90
50	050	Jl. Wonorejo	1,50	4,50	1,50	-	-	1,50	-	-	-
51	051	Jl. Margorukun	1,14	4,50	1,14	-	-	1,14	-	-	-
52	052	Jl. Sudirman I	0,38	4,50	0,38	-	-	0,38	-	-	-
53	053	Jl. Sudirman III	0,80	5,00	0,80	-	-	0,80	-	-	-
54	054	Jl. Pertiwi	0,62	4,50	0,62	-	-	0,62	-	-	-

No	No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lebar (m)	Type Permukaan (Km)			Kondisi (Km)			
					Aspal/ Beton	Agregat	Tanah	Baik	Sedan g	Rusak Ringan	Rusak Berat
55	055	Jl. Ronggolawe	0,50	4,50	0,50	-	-	0,50	-	-	-
56	056	Jl. Keranji	1,50	4,50	1,50	-	-	1,50	-	-	-
57	057	Jl. AIS Nasution	0,43	4,50	0,43	-	-	0,43	-	-	-
58	058	Jl. Kenanga	1,42	4,50	1,42	-	-	1,42	-	-	-
59	059	Jl. Piere Tendean	0,38	5,00	0,38	-	-	0,38	-	-	-
60	060	Jl. Mawar	0,40	3,50	0,40	-	-	0,40	-	-	-
61	061	Jl. Anggrek	0,70	3,50	0,70	-	-	0,70	-	-	-
62	062	Jl. Dahlia	0,25	4,00	0,25	-	-	0,25	-	-	-
63	063	Jl. Cempaka Putih	0,52	4,50	0,52	-	-	0,52	-	-	-
64	064	Jl. Teratai	0,38	3,50	0,38	-	-	0,38	-	-	-
65	065	Jl. Veteran	0,43	3,50	0,43	-	-	0,43	-	-	-
66	066	Jl. Imam Bonjol	0,90	5,00	0,90	-	-	0,90	-	-	-
67	067	Jl. Merak	0,38	4,50	0,38	-	-	0,38	-	-	-
68	068	Jl. Flores	0,10	4,00	0,10	-	-	0,10	-	-	-
69	069	Jl. Maluku	0,10	6,00	0,10	-	-	0,10	-	-	-
70	070	Jl. Sumbawa	0,10	4,00	0,10	-	-	0,10	-	-	-
71	071	Jl. Timur	0,20	5,00	0,20	-	-	0,20	-	-	-
72	072	Jl. Panglima Batur	0,85	6,00	0,85	-	-	0,85	-	-	-
73	073	Jl. Sengaji	0,85	7,00	0,85	-	-	0,85	-	-	-
74	074	Jl. Perwira	0,10	3,50	0,10	-	-	0,10	-	-	-
75	075	Jl. Merdeka I, II	0,10	5,00	0,10	-	-	0,10	-	-	-
76	076	Jl. Mangkusari	0,52	5,00	0,52	-	-	0,52	-	-	-
77	077	Jl. P. Antasari	0,43	6,00	0,43	-	-	0,43	-	-	-
78	078	Jl. Manggis	0,33	4,00	0,33	-	-	0,33	-	-	-
79	079	Jl. Durian	0,28	4,00	0,28	-	-	0,28	-	-	-
80	080	Jl. T. Surapati	0,66	8,00	0,66	-	-	0,66	-	-	-
81	081	Jl. Merpati	0,43	4,00	0,43	-	-	0,43	-	-	-
82	082	Jl. Rajawali	0,52	4,50	0,52	-	-	0,52	-	-	-
83	083	Jl. Bangau	0,47	4,50	0,47	-	-	0,47	-	-	-

No	No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lebar (m)	Type Permukaan (Km)			Kondisi (Km)			
					Aspal/ Beton	Agregat	Tanah	Baik	Sedan g	Rusak Ringan	Rusak Berat
84	084	Jl. Pramuka I	0,80	4,50	0,80	-	-	0,80	-	-	-
85	085	Jl. Panti Ajar	0,70	3,50	0,70	-	-	0,70	-	-	-
86	086	Jl. Pramuka	1,48	8,00	1,48	-	-	1,48	-	-	-
87	087	Jl. Wirapraja	0,70	4,50	0,70	-	-	0,70	-	-	-
88	088	Jl. Samping Stadion	0,47	4,00	0,47	-	-	0,47	-	-	-
89	089	Jl. Padat Karya	0,47	4,50	0,47	-	-	0,47	-	-	-
90	090	Jl. Nanas	0,50	4,50	0,50	-	-	0,50	-	-	-
91	091	Jl. Langsung	0,60	4,50	0,60	-	-	0,60	-	-	-
92	092	Jl. Beringin	0,43	5,00	0,43	-	-	0,43	-	-	-
93	093	Jl. Nusa Indah	0,38	3,50	0,38	-	-	0,38	-	-	-
94	094	Jl. Srikaya	0,22	3,50	0,22	-	-	0,22	-	-	-
95	095	Jl. Keladan	0,65	3,50	0,65	-	-	0,65	-	-	-
96	096	Jl. Akasia	1,10	4,50	1,10	-	-	1,10	-	-	-
97	097	Jl. Meranti	0,43	8,00	0,43	-	-	0,43	-	-	-
98	098	Jl. Nangka	1,10	3,50	1,10	-	-	1,10	-	-	-
99	099	Jl. Semoga Indah	0,50	4,50	0,50	-	-	0,50	-	-	-
100	100	Jl. Indah Permai	0,10	3,50	0,10	-	-	0,10	-	-	-
101	101	Jl. Lembaga I	0,40	3,50	0,40	-	-	0,40	-	-	-
102	102	Jl. Lembaga II	0,36	3,50	0,36	-	-	0,36	-	-	-
103	103	Jl. Pramuka II	0,85	4,50	0,85	-	-	0,85	-	-	-
104	104	Jl. Reformasi	1,50	5,00	-	-	1,50	-	-	1,50	-
105	105	Sp. Thamrin - Trans Liju	9,20	4,50	3,00	6,20	-	9,20	-	-	-
106	106	Trans Liju - Benangin V	9,80	4,50	5,00	4,80	-	9,80	-	-	-
107	107	Jl. Negara Km. 7 - Sei Batu	4,60	4,50	-	-	4,60	-	-	-	4,60
108	108	Jl. Weyang - Jl. Negara Km. 6,5	2,50	4,50	0,50	2,00	-	0,50	2,00	-	-
109	109	Rubai - Paring Lahung	5,00	4,50	-	-	5,00	-	-	-	5,00
110	110	Jl. Pantung (Mampuak II - Sp. Jl. HPH)	4,00	4,50	-	4,00	-	-	-	-	4,00
111	111	Jl. Tongka - Mampuak I	12,00	4,50	-	-	12,00	-	-	-	12,00
112	112	Jl. Trans Mampuak I - Sp. Jl. HPH	2,00	4,50	-	-	2,00	-	-	-	2,00

No	No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lebar (m)	Type Permukaan (Km)			Kondisi (Km)			
					Aspal/ Beton	Agregat	Tanah	Baik	Sedan g	Rusak Ringan	Rusak Berat
113	113	Montallat I - Montallat II Seberang	2,00	4,50	-	2,00	-	-	-	2,00	-
114	114	Jl. Trehean – Buper	1,50	4,50	-	1,50	-	1,50	-	-	-
115	115	Jl. Pararawen Km. 2 (Mtw-P. Cahu)	2,40	4,50	2,40	-	-	2,40	-	-	-
116	116	Jl. Permata Hijau	0,42	4,00	0,42	-	-	0,42	-	-	-
117	117	Jl. Persemaian	1,75	4,00	1,75	-	-	1,00	-	0,70	0,05
118	118	Jl. SDLB	0,48	3,50	0,48	-	-	0,48	-	-	-
119	119	Jl. Taman Remaja	1,30	5,00	0,70	-	0,60	0,70	0,40	0,20	-
120	120	Jl. Nangka II	0,23	3,50	0,23	-	-	0,23	-	-	-
121	121	Jl. Angah	0,55	3,50	0,30	-	0,25	0,30	-	0,25	-
122	122	Jl. Batu Raya I – II	5,00	4,50	-	4,00	1,00	3,00	1,00	1,00	-
123	123	Jl. Poros Sp. Km. 34 – Gandring	18,00	5,00	-	1,00	17,00	1,00	2,00	14,00	1,00
124	124	Jl. Km. 34 - Sp. Benangin	54,00	5,00	18,00	36,00	-	45,00	3,00	2,00	4,00
125	124	Jl. Muara Bakah Seberang - Lahei II	9,00	6,00	1,50	2,00	5,50	1,50	1,50	2,00	4,00
126	125	Jl. Kelud	0,40	6,00	0,40	-	-	-	-	-	0,40
127	130	Jl. Poros Trahean-Bintang Ninggi-Butong	8,00	8,00	-	-	8,00	-	6,00	1,00	1,00
		Jumlah	625,74		256,89	101,60	267,25	275,84	90,20	72,15	187,55

Sumber : Bidang Bina Marga, Juni 2014

Sedangkan untuk pembangunan jembatan, Kabupaten Barito Utara memiliki 135 buah jembatan dengan total panjang 3.289 meter yang terdiri dari jembatan permanen rangka baja sebanyak 3 buah (220 meter), jembatan semi permanen rangka baja sebanyak 3 buah (150 meter), jembatan gantung sebanyak 7 buah (972 meter), jembatan beton balok T/girder sebanyak 37 buah (899 meter) dan jembatan kayu ulin sebanyak 85 buah (1.048 meter). Ditengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jembatan-jembatan dalam kondisi rusak (terutama yang berbahan kayu) Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berupaya melakukan penanganan/perbaikan dan penggantian jembatan yang terbuat dari kayu ulin dengan konstruksi yang lebih permanen.

Tabel 12. Gambaran Umum Jembatan di Kabupaten Barito Utara

No.	Jenis Konstruksi Jembatan	Jumlah (buah)	Total Panjang (m)
1.	Jembatan permanen rangka baja	3	220
2.	Jembatan semi permanen rangka baja	3	150
3.	Jembatan Gantung	7	972
4.	Jembatan beton balok T/Girder	37	899
5.	Jembatan kayu	85	1.048
Total		135	3.289

Sumber : Bidang Bina Marga, 2013

Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara di bidang bina marga meliputi : peningkatan/pembangunan jalan; peningkatan/pembangunan jembatan; dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

2. Bidang Sumber Daya Air

Fokus pembangunan untuk pengelolaan sumber daya air untuk peningkatan ketersediaan air baku bagi domestik, pertanian, dan industri secara berkelanjutan serta mengurangi resiko akibat daya rusak air. Fokus pembangunan ini ditujukan pada upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air, pola distribusi sumber daya air dan pola pemanfaatan sumber daya air. Fokus pembangunan juga ditujukan pada upaya peningkatan dukungan infrastruktur sumber daya air, khususnya infrastruktur irigasi, mengingat masih tingginya ketergantungan lahan pertanian pangan pada keandalan ketersediaan air baku. Disamping itu fokus pembangunan juga ditujukan pada upaya penyediaan air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bagi permukiman (perkotaan maupun perdesaan), khususnya penyediaan air baku untuk air minum. Serta fokus pembangunan juga ditujukan untuk mengendalikan tingkat resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan dan abrasi.

Kabupaten Barito Utara memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar yaitu meliputi air permukaan dan air tanah yaitu : a). Sungai Barito yang merupakan jaringan sumber daya air lintas provinsi dan kabupaten; b).Anak Sungai Barito yaitu Sungai Montallat, Sungai Teweh dan Sungai Lahei yang merupakan wilayah sungai kabupaten; c) Air tanah dalam.

Berdasarkan data dari Stasiun Beringin Muara Teweh tahun 2003-2010, curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni hingga September setiap tahunnya. Pada bulan-bulan ini curah hujan hanya berkisar antara 154 – 162 mm dan hari hujan hanya berkisar antara 11 – 15 hari. Sedangkan untuk bulan Oktober hingga Desember curah hujan mencapai 244 – 449 mm, dengan hari hujan diatas 20 hari per bulannya. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember setiap tahunnya.

Berdasarkan data pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Barito Utara tahun 2013 mengenai jaringan irigasi di Kabupaten Barito Utara.

Panjang masing-masing jaringan irigasi yaitu: jaringan primer sepanjang 3.339 km, jaringan sekunder sepanjang 23.550 km dan jaringan tersier sepanjang 30.225 km serta terdapat 1.463 Ha lahan budidaya.

Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara di bidang sumber daya air meliputi: rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; serta pembersihan dan pengerukan sungai/kali.

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan di bidang sumber daya air antara lain: a).masih banyaknya terjadi kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berdampak belum pada belum optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi; b).masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi; c).perlunya mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ber – irigasi; d).perlunya upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai untuk mempertahankan kemampuan penyediaan air baku; dan e).mengembalikan bantaran dan tanggul sungai pada fungsinya semula sebagai upaya untuk meminimalisir berkurangnya areal terbuka hijau sepanjang jalur sungai.

Tabel 13. Sungai yang Masih Dapat Dilayari di Kab. Barito Utara

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-rata	
				Kedalaman (meter)	Lebar (meter)
1.	Sungai Barito	900,00	780,00	8	650
2.	Sungai Montallat	11,25	11,25	4	74
3.	Sungai Teweh	87,50	67,50	4	55
4.	Sungai Lahei	77,50	50,50	5	90

Sumber : Buku Profil Barito Utara

Tabel 14. Jaringan Irigasi dan Rawa di Kabupaten Barito Utara

No.	Kecamatan/ Daerah Irigasi Dan Rawa	Luas Baku (Ha)	Luas Potensial (Ha)	Luas Fungsional (Ha)
I.	<u>KEC. TEWEH SELATAN</u>			
1.	D.I. Trinsing	688	688	388
2.	D.I. Tandrehean	500	400	400
3.	D.R. Bintang Ninggi	100	75	75
4.	D.R. Butong	100	100	100
5.	D.R. Buntok Baru	250	250	250
II.	<u>KEC. MONTALLAT</u>			
1.	D.I. Montallat	408	150	150
2.	D.R. Tumpung Laung	521	400	400
3.	D.R. Balangiran	500	100	100
4.	D.R. Marepa	400	400	400
5.	D.R. Sikan	250	125	125
6.	D.R. Pepas	228	228	228
7.	D.R. Ruji	200	100	100
6.	D.R. Paring Lahung	200	100	100
9.	D.R. Kamawen	250	250	-
III.	<u>KEC. GUNUNG TIMANG</u>			
1.	D.R. Kandui	150	50	50
2.	D.I. Majangkan	200	100	100
3.	D.R. Baliti	100	100	100
4.	D.I. Walur	200	100	100
5.	D.I. Bawang	350	175	175
6.	D.I. Malungai	100	50	50
7.	D.I. Mantiong	500	100	-
8.	D.R. Batu Raya	300	300	-
IV	<u>KEC. LAHEI</u>			
1.	D.I. Inu	500	500	-
V	<u>KEC. TEWEH TIMUR</u>			
1.	D.I. Jamut	830	830	-
VI	<u>KEC. GUNING PUREI</u>			
1.	D.R. Lawarang	250	250	-
JUMLAH		8.075	5.921	3.391

Sumber : SK.Bupati Barut No.188.45/169/2013 tentang Penetapan status ruas-ruas jalan kabupaten/kota, jalan lingkungan/desa, jaringan jalan strategis (JJS), Jaringan irigasi dan Rawa di Kabupaten Barito Utara

Tabel 15. Saluran, Bangunan dan Jalan Inspeksi Jaringan Irigasi dan Rawa di Kabupaten Barito Utara

No.	Jenis	Luas (m2)
1.	Saluran primer	18.364,5
2.	Saluran sekunder	267.050,0
3.	Saluran tersier	194.865,0
4.	Bangunan bagi/ bagi sadap	1.020,0
5.	Box tersier/ kwarter	492,0
6.	Gorong-gorong	180,0
7.	Chekdam	300,0
8.	Bendung + areal	1.333,3
9.	Jalan inspeksi :jalan tanah	50.100,0
10.	Jalan inspeksi :titian kayu ulin	9.110,0
11.	Jalan inspeksi : perkerasan	15.000,0
	Jumlah	13.889.231,5

Sumber : SK.Bupati Barut No.188.45/169/2013 tentang Penetapan status ruas-ruas jalan kabupaten/kota, jalan lingkungan/desa, jaringan jalan strategis (JJS), Jaringan irigasi dan Rawa di Kabupaten Barito Utara

3. Bidang Cipta Karya

Pembangunan infrastruktur bidang cipta karya (permukiman) mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai *multiflier* ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang cipta karya (permukiman) yang telah dibangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang cipta karya (permukiman) pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai

- meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi

kemiskinan dan memperluas lapangan kerja; c),meningkatkan kualitas lingkungan, yang dimaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh

Berdasarkan data pada Bidang Cipta Dinas Pekerjaan Umum Barito Utara pada Bulan Juli 2014, Jumlah rumah layak huni dan rumah tangga bersanitasi Kabupaten Barito utara adalah 10.848 buah atau 41,74% dari seluruh rumah yang berjumlah 25.990 buah dan rumah tangga pengguna air bersih adalah 10.668 rumah tangga atau 34,16 dari seluruh rumah tangga di Barito Utara yang berjumlah 31.225 rumah tangga. Dengan prosentase permukiman kumuh di Barito Utara sebesar 0,01% atau 88,83 Ha dari luas wilayah Barito Utara 830.000 Ha sedangkan Kawasan kumuh Kabupaten Barito Utara berkisar 129,60 Ha atau 0,02% dari luas wilayah Barito Utara.

Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara di bidang cipta Karya (permukiman) meliputi : penyediaan sarana air limbah dan sanitasi dasar; pengembangan sarana prasarana air minum; penyediaan air bersih perdesaan; penyediaan sarana dan prasarana permukiman berupa jalan lingkungan; pembangunan bangunan gedung fasilitas umum dan sosial, dan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Dalam memberikan pelayanan di bidang cipta karya ini masih terdapat beberapa kendala-kendala yang memerlukan solusi dengan permasalahannya, yaitu berupa :

- a). keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jalan lingkungan di Barito Utara dengan Panjang jalan lingkungan di Kabupaten Barito Utara 372.906,55 meter dengan Luas 1.287.106,05 M2;
- b). munculnya permukiman-permukiman baru sebagai dampak dari berkembangnya suatu daerah, mengakibatkan bertambahnya /muncul jalan lingkungan baru di Barito Utara yang perlu dilakukan peningkatan jalan;
- c). sebagai daerah yang sering terjadi banjir musiman, maka berdampak kepada cepatnya terjadi kerusakan pada jalan lingkungan yang ada;

- d). belum optimalnya akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan masyarakat;
- e). perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan /rumah untuk tetap memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir dan kekumuhan;
- f). masih banyak masyarakat Barito Utara yang yang belum terjangkau fasilitas untuk ketersediaan air bersih dan air minum terutama di wilayah perdesaan;
- g). masih belum tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam memelihara saluran limbah lingkungan yang telah dibangun, sehingga berdampak masih banyaknya saluran limbah yang rusak dan mampet oleh endapan lumpur dan sampah.

4. Bidang Tata Kota

Salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan. Berkenaan dengan itu tantangan pembangunan di Kabupaten Barito Utara di Bidang Tata Kota antara lain : mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah; meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) terutama sampah rumah tangga sehingga pemilahan sampah dapat dilaksanakan dari sumbernya; meningkatkan sarana dan prasarana persampahan untuk masyarakat; mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari.

Timbunan sampah di Kota Muara Teweh sumbernya berasal dari sampah domestik, yakni sampah permukiman, sampah perkantoran, sampah pasar, sampah pertokoan/komersil, serta sampah jalan dan lain-lain yang sebagian besar merupakan sampah organik. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara tahun 2011, jumlah timbunan

sampah penduduk Kota Muara Teweh adalah sebesar 31.507 kg/hari, atau jika dibagi dengan jumlah penduduk pada daerah pelayanan yang berjumlah 33.091 jiwa maka didapat produksi sampah rata-rata sebesar 0,95 kg/orang/hari. Besarnya timbunan sampah yang berasal dari komponen-komponen sumber sampah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Timbunan Sampah Berdasarkan Sumber Sampah

No.	Sumber Sampah	Timbunan Sampah	
		Volume (kg/hari)	%
1.	Permukiman	10.504	33,34
2.	Perkantoran/ Institusi	1.638	5,20
3.	Pertokoan/ Komersil	3.119	9,9
4.	Pasar	8.189	25,99
5.	Jalan	3.233	10,26
6.	Lain-lain	4.824	15,31
Jumlah		31.507	100

Sumber : Dinas PU Barito Utara , 2011

Sedangkan rencana penyebaran lokasi pewadahan komunal (TPS) berupa kontainer *arm-roll truck* dan bangunan beton yang akan ditempatkan pada daerah permukiman padat penduduk dan daerah perdagangan (pasar dan pertokoan/komersil) yang selama ini memiliki timbunan sampah yang cukup besar, diharapkan pewadahan tersebut dapat difungsikan secara optimal, dengan lokasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17. Rencana Lokasi Penempatan Pewadahan Komunal (TPS) Sampah

No.	Lokasi	Jumlah TPS
1.	Jalan Pangeran Antasari	1
2.	Jalan Dahlia (Lapangan Hijau)	1
3.	Jalan Merdeka	1
4.	Jalan Panglima Batur (Pasar Pendopo)	1
5.	Pertokoan Pasar Gembira	1
6.	Jalan Cempaka Putih- Piere Tendean	1
7.	Jalan Imam Bonjol	1
8.	Jalan Bangau	1
9.	Jalan Samping Stadion	1
10.	Jalan Nenas	1

No.	Lokasi	Jumlah TPS
11.	Jalan Langsung	1
12.	Jalan Akasia	1
13.	Jalan Beringin	1
14.	Jalan Yetro Sinseng Pasar Bebas Banjir	2
15.	Jalan Meranti	3
16.	Jalan Pramuka	4
17.	Jalan Pendreh	4
18.	Jalan Jenderal Sudirman	2
19.	Jalan Brigjen Katamso	2
Jumlah		30

Sumber : Dinas PU Barito Utara, Hasil Analisis, 2011

Isu yang mengemuka terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu keberadaan Tempat Pembuangan Akhir selain menampung timbunan sampah, juga meminimalisasi bahaya akibat penimbunan sampah tersebut, baik secara fisik, kimia maupun biologi sehingga perlunya pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir yang layak, baik secara teknis maupun non teknis serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau publik sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRWK.

5. Bidang Tata Ruang

Pentingnya segera mengesahkan Perda RTRW Kabupaten Barito Utara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan isu strategis yang harus segera dituntaskan karena sampai saat ini Rancangan Peraturan Daerah RTRWK Barito Utara masih menunggu pengesahan dari DPRD Kabupaten Barito Utara.

Sementara itu menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang terus intensif dilakukan. Prioritas lainnya yaitu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan

pengawasan pemanfaatan, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.

6. Bidang Peralatan dan Perbekalan

Pemenuhan Alat Berat untuk bergerak cepat dan bertindak tepat terhadap kerusakan jaringan jalan dan jembatan melalui kegiatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik untuk mendukung pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pelayanan dibidang peralatan dan perbekalan.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terampil dan teknisi peralatan konstruksi harus terus dilakukan dengan mengikutsertakan teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi dan pengelola laboratorium untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

Kondisi sebagaimana yang digambarkan tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam pembangunan infrastruktur, dengan harapan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara akan semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kinerja pemerintahan sangatlah dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau mengalami kegagalan dari pencapaian suatu misi organisasi pemerintah.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan atas penyelenggaraan terhadap kebutuhan akan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman, sesuai dengan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara harus dapat mengakomodirnya. Tantangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara kedepan adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan dimaksud meliputi 1). Meningkatkan pelayanan jaringan jalan (aksesibilitas) yang lebih lancar (mobilitas), tertib dan selamat; 2).Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; dan 3).meningkatnya kegiatan pemeliharaan dan perawatan jalan; serta 4).sanksi penyelenggara jalan.

Pembangunan jalan akan datang diarahkan pada penanganan jalan-jalan strategis yang merupakan jalan poros yang menghubungkan antar wilayah kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan poros ini diharapkan pada tahun 2018 telah mendapat perkerasan aspal. Salah satu solusi yang diambil untuk percepatan penanganan Jaringan Jalan Strategis Kabupaten Barito Utara adalah dengan melakukan kegiatan peningkatan jalan dengan menggunakan Kontrak Tahun Jamak (Multi Year) yang rencananya akan dibiayai dalam 4 (empat) tahun anggaran, yang dimulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2017. Dengan menggunakan kontrak tahun jamak diharapkan keuntungan yang dapat diambil yaitu : menghemat waktu untuk pelelangan, menghemat biaya mobilisasi, pelaksanaan fisik dapat berkesinambungan sehingga ruas jalan bisa tetap fungsional dan arus transportasi lancar serta masa pemeliharaan yang lebih lama. Dengan terlaksananya pembangunan jalan-jalan strategis ini diharapkan berbagai produksi barang dan jasa dapat dipasarkan dengan biaya transportasi yang murah dan waktu tempuh yang lebih cepat.

- b. Sarana dan Prasarana Kebinamargaan untuk pemeliharaan dan perawatan jalan dan peningkatan kualitas jalan raya.

Ketersediaan peralatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara untuk pemeliharaan dan perawatan jalan, banyak yang sudah mengalami penyusutan. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas pekerjaan jalan di masa mendatang memerlukan bahan-bahan yang memenuhi standar dan penambahan alat-alat berat. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan standarisasi terhadap bahan dan peralatan yang ada sesuai dengan ketersediaan teknologi yang ada. Disamping itu perlu pula peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan workshop yang ada.

- c. Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Rawa, Pengendalian Banjir, Ketersediaan layanan air bersih/air minum dan fasilitas publik.

Masih banyaknya terjadi kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berdampak belum pada belum optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi. Oleh karena itu diperlukan operasi dan pemeliharaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana tersebut guna memberikan pelayanan kepada petani dan ketersediaan air baku untuk lahan pertanian. Upaya peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran primer dan sekunder terutama pada wilayah kecamatan yang merupakan lumbung pangan. Dalam kaitan ini para petani perlu difasilitasi dan didorong untuk berperan aktif untuk mampu menjamin berfungsinya saluran-saluran primer dan sekunder yang langsung membawa air ke wilayah persawahan.

Pengendalian banjir juga menjadi tantangan kedepan karena sebagai daerah yang sering mendapatkan banjir musiman pada saat intensitas hujan tinggi, hal ini memerlukan penanganan secara serius antara lain dengan rehabilitasi drainase-drainase pembuangan pada milik jalan dan

mempertahankan daerah tangkapan air pada sungai-sungai serta menjaga kelestarian daerah bantaran sungai dari endapan lumpur.

Dalam penyediaan air bersih, terutama air bersih perkotaan akan diupayakan dengan memperluas jalur perpipaan untuk mengupayakan ketersediaan air bersih/air minum. Penyediaan air bersih perdesaan diupayakan dengan meningkatkan pembangunan baru Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan.

Selanjutnya untuk mengembangkan kawasan perkotaan yang refresentatif perlu dibangun fasilitas-fasilitas umum (pusat-pusat perkantoran dan pusat ekonomi lainnya) di kawasan pengembangan baru yang meliputi pengembangan utilitas pendukungnya.

d. Sumber Daya Manusia, Penguatan Kelembagaan dan Transparansi

Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, dimasa yang akan datang perlu penambahan personil di Dinas Pekerjaan Umum terutama dengan keahlian dibidang keuangan (akuntan) , mekanik dan operator serta operator komputer. Disamping itu perlu pula tetap meningkatkan SDM yang ada melalui pelatihan-pelatihan teknis. Penguatan kelembagaan menjadi tuntutan yang tak terelakkan pada masa sekarang yang menuntut dilakukan percepatan disegala bidang pembangunan, oleh karena itu pembenahan manajemen menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan. Transparansi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara juga menjadi hal mendasar yang perlu dilakukan guna mencapai tata pemerintahan yang baik.

e. Peran Swasta dan Masyarakat

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Kerjasama antara ketiga pilar merupakan hal yang harus terus dikembangkan, ketiganya

mempunyai peran masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam pemerintahan. Swasta berperan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan pembangunan. dimana dengan pendanaan yang cukup maka pembangunan akan lebih pelaksanaannya. Sedangkan masyarakat berperan menciptakan interaksi sosial, ekonomi dan politik serta pengawas pembangunan oleh pemerintah.

Adapun peluang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- a. Mengupayakan dukungan pendanaan dari berbagai sumber yang memungkinkan (APBN dan APBD Provinsi) untuk memenuhi kebutuhan akan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, sehingga meningkatkan dukungan kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Barito Utara.
- b. Penambahan alat-alat berat untuk pemeliharaan jalan yang maksimal, sehingga penyelenggaraan jalan akan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan serta operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur daerah.
- d. Menciptakan sumber daya manusia yang handal untuk melaksanakan pembangunan dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis dan membangun database pembangunan infrastruktur daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan uraian mengenai gambaran umum pelayanan SKPD dapat disimpulkan permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pendanaan

Keterbatasan pendanaan mengakibatkan belum maksimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti :

- a. Usulan peningkatan status jalan dan penanganan pemeliharaan jalan belum terakomodir semuanya.
- b. Penyelenggaraan pembangunan jalan masih belum memenuhi Indikator Kinerja Kunci sehingga kurang maksimalnya aksesibilitas, mobilitas dan tingkat keselamatan.
- c. Belum optimalnya akses layanan air minum dan distribusi air serta sarana publik lainnya.
- d. Minimnya pembangunan jalan pada kawasan strategis.
- e. Sistem Informasi Jasa Konstruksi belum maksimal.

2. Sumber Daya Manusia personil yang masih kurang memadai, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur.
3. Data-data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur, yang tersedia belumlah data yang terbaru sehingga seluruh stakeholder belum dapat mengakses keberadaan data serta informasi yang dibutuhkan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang dan peng-update-an data sebagai tahap selanjutnya.
4. Masih kurang pemahaman seluruh stakeholder terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru, sehubungan dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Pekerjaan Umum;
5. Sering terjadinya kendala-kendala teknis dan non teknis yang muncul selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yakni “ *Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkeadilan Menuju Kabupaten Barito Utara yang Lestari dan Sejahtera*”. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang.
2. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perijinan dan penyiapan lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.
3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal, nasional maupun global.
4. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi.
5. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya masyarakat, toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara terlibat langsung pada pencapaian Misi ke-1 yaitu Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju

investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang, dan terkait dalam pelaksanaan Misi ke-3 yaitu Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal, nasional maupun global, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara juga terkait pada Misi ke-4 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dapat dijelaskan masih adanya wilayah desa yang tertinggal salah satunya disebabkan minimnya aksesibilitas masyarakat pada wilayah tersebut untuk mencapai pusat-pusat kegiatan untuk memasarkan produk maupun memenuhi kebutuhan hidupnya. Aksesibilitas di kawasan produksi tidak hanya dipandang dari sisi keterhubungan, melainkan juga kompatibilitas prasana dan sarana yang dipergunakan dalam transportasi logistik antara kawasan produksi. Hal ini diindikasikan masih banyaknya kawasan produksi maupun budidaya yang belum dapat dilalui kendaraan, baik karena keterbatasan struktur jalan ataupun keterbatasan geometrik jalan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 memaparkan tantangan dalam pembangunan infrastruktur khususnya bidang pekerjaan umum dan permukiman di Indonesia yaitu berupa kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan diluar Jawa; menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan provinsi/

kabupaten/ kota; serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Selanjutnya isu strategis yang mengemuka terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan antara lain : jaringan jalan di lintas utama 4 (empat) pulau besar yang masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Salah satu kebijakan pembangunan prasarana jalan yang terdapat dalam Renstra Kementerian PU adalah mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis pulau (Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua). Secara garis besar, potensi dan kendala baik aspek geografis, geopolitik dan geoekonomi di dalam pengembangannya perlu memperhatikan kerangka pengembangan strategis berdasarkan pada aspek pengembangan ekonomi, keseimbangan antarwilayah (daerah tertinggal dan daerah berkembang), dan aspek kesatuan teritorial NKRI. Koridor poros pengembangan strategis perlu mempertimbangkan konteks kerangka strategis berorientasi ekonomi (investasi). Dalam konteks orientasi tersebut, kawasan-kawasan koridor yang terdiri dari daerah tertinggal seperti kawasan koridor Pantai Barat Sumatera, Pansela Jawa, Koridor Kalimantan Tengah pengembangannya diorientasikan kepada poros pengembangan strategis ekonomi sebagai penggerak mula terdahulu.

Dengan wilayah yang cukup luas serta dengan kondisi alam yang relatif masih berhutan, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas antar kawasan di Kalimantan Tengah menjadi isu pokok pembangunan bahkan dalam beberapa tahun kedepan. Hal ini disebabkan karena dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam rangka membangun kondisi infrastruktur dan aksesibilitas antar kawasan tersebut lebih dalam, isu-isu yang berhubungan dengan infrastruktur antara lain: 1) terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan; 2) lemahnya integrasi jaringan infrastruktur multimoda; 3) lemahnya aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman ; dan 4)masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan wilayah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan merupakan aspek yang penting dalam implementasi otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penataan ruang merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, untuk dapat mampu mengakomodir semua aspek pembangunan dalam upaya mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang dan hubungan fungsional sesuai azas manfaat, keseimbangan dan keserasian serta memenuhi azas nilai-nilai kelestarian lingkungan.

Penataan ruang juga merupakan manifestasi dari seluruh kehidupan fisik, sosial budaya, ekonomi dan politik, suatu upaya untuk membentuk lingkungan hidup yang lebih baik, penataan struktur ekonomi yang lebih efisien serta menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya kehidupan sosial budaya yang lebih baik.

Wilayah Kabupaten Barito Utara berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan Selatan dan memiliki peran sebagai pengimbang. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pembangunan yang digariskan di Kabupaten Barito Utara berorientasi untuk kepentingan nasional (terutama untuk daerah Kalimantan Tengah). Dalam struktur tata ruang wilayah makro, Kabupaten Barito Utara diarahkan pengembangannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus menjadi bagian dari kawasan pengimbang (*counter magnet*) Muara Teweh. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, dan permukiman. Kebijakan pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan dominan, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

a. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Barito Utara untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Utara 2011 – 2031, adalah untuk *”Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Barito Utara yang berkeseimbangan lingkungan, berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata”*.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Barito Utara terdiri dari kebijakan pengembangan/penataan struktur ruang dan kebijakan pengembangan/ penataan pola ruang wilayah Kabupaten Barito Utara.

b. Kebijakan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Barito Utara meliputi kebijakan pengembangan sistem perkotaan dan kebijakan pengembangan sistem prasarana wilayah. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Barito Utara. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan wilayah Kabupaten Barito Utara diarahkan untuk :

1. Pembentukan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan kota-kota lainnya di Kalimantan Tengah sebagai kawasan perkotaan yang cepat tumbuh;
2. Pengembangan sistem pusat pelayanan yang hirarkis sesuai dengan cakupan wilayah pelayanannya dan fasilitas pendukung minimumnya;
3. Paduserasi penataan dan pengembangan masing-masing pusat pelayanan/kegiatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
4. Pengembangan sistem jaringan prasarana dan penyediaan sarana perkotaan.

c. Kebijakan Pola Ruang

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Barito Utara meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Barito Utara. Uraian kebijakan pola ruang Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pola ruang kawasan lindung:

- Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan setempat;
- Pengendalian kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan melalui rehabilitasi dan konservasi.
- Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota sebesar 30% dari luas wilayah Kabupaten Barito Utara yang meliputi 20% RTH publik dan 10% RTH privat;
- Pemenuhan RTH Publik melalui penyediaan taman kota, taman lingkungan, hutan kota, Sabuk Hijau, Jalur hijau jalan dan fungsi tertentu.
- Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH Privat.

2. Kebijakan pola ruang kawasan budidaya:

- Pengembangan kawasan budidaya permukiman perkotaan dan ruang investasi bagi sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa kreatif;
- Optimalisasi pengembangan kawasan terbangun/ perkotaan sepanjang koridor jaringan transportasi yang telah terbentuk terutama koridor timur-barat.
- Pengembangan dan penetapan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam;
- Pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis melalui kerjasama pemerintah dan swasta.

d. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten Barito Utara dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

e. Lingkungan Hidup

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi, antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya; kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Isu-isu strategis lingkungan hidup terkait penataan ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara adalah :

- Adanya aktivitas budidaya di kawasan lindung yang mengganggu kelestarian kawasan lindung,
- Adanya kerusakan kawasan hutan akibat eksploitasi dan eksplorasi tambang batu bara dan penebangan kayu.
- Karakteristik fisik lingkungan yang bergelombang sehingga memerlukan investasi yang besar terutama untuk sistem jaringan air bersih, maupun untuk pembangunan fisik lainnya.
- Maraknya pertambangan dan kerusakan lingkungan yang berdampak negatif pada kondisi lingkungan Kabupaten Barito Utara serta potensi terjadinya banjir di Kota Muara Teweh karena berada pada DAS Barito.

Penyusunan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara baik terutama pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan/usaha sektor lain di luar sektor kehutanan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi

Perairan serta Wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 522.1.100/236/Dishut tanggal 12 Februari 2013 Perihal Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012. Sehingga dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah harus mengacu dan terintegrasi dengan peruntukan serta fungsi kawasan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012. Begitu pula halnya dengan penyusunan RTRW Kabupaten Barito Utara secara hirarki telah mengacu pada RTRWP dan SK.529/Menhut-II/2012.

Strategi dan implementasi pelaksanaan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Kabupaten Barito Utara harus tetap menjaga keberadaan Fungsi Kawasan Konservasi dan Kawasan Lindung yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Bidang Kehutanan. Pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan/usaha sektor lain di luar sektor kehutanan yang berada di kawasan hutan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan dan harus mentaati ketentuan daerah penyangga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, untuk perubahan kawasan hutan pada RTRWK, dapat mengusulkan melalui usulan perubahan kawasan hutan secara parsial dan untuk wilayah provinsi, dapat berupa : (1) usulan perubahan peruntukan yaitu usulan perubahan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, (2) usulan perubahan fungsi kawasan hutan yaitu usulan perubahan antar fungsi kawasan hutan, dan (3) usulan penambahan kawasan hutan yaitu usulan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Keberhasilan pembangunan ditentukan dengan menganalisis faktor lingkungan baik dalam maupun luar, faktor tersebut berfungsi untuk penajaman strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien. Analisis terhadap faktor lingkungan dimaksud dapat disusun dengan mengidentifikasi indikator keberhasilan. Dalam hal ini yang berperan penting adalah faktor kekuatan dari suatu instansi dengan memanfaatkan peluang yang ada sehingga menjadi faktor pendorong. Disisi lain dalam melaksanakan kegiatan di suatu instansi juga menghadapi kendala, yaitu kelemahan instansi itu sendiri yang menjadi ancaman.

Perkembangan strategis dapat diukur melalui pengamatan awal/kondisi *existing* yang dibandingkan dengan posisi akhir tahun anggaran sebagai titik posisi berakhirnya seluruh kegiatan, dengan pengaruh/dampak dari imbas sebuah keluaran yang merupakan *outcome* dan *benefit* yang akan dirasakan masyarakat. Perbedaan kondisi merupakan keluaran yang diberikan dari kegiatan yang menjadi urusan wajib yang harus diselesaikan pada kurun waktu tertentu.

Mengacu pada gambaran kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, permasalahan yang dihadapi, sasaran penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan kerangka pikir penyusunan Renstra berdasarkan telaahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi, RTRW dan KLHS, maka isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antar kecamatan, antar desa dan wilayah terisolir seperti belum terhubungnya secara baik 16 ruas Jaringan Jalan Strategis kabupaten dan belum tuntasnya penanganan $\pm$ 85 buah jembatan kayu ulin.
2. Meningkatkan/ mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.

3. Keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jalan lingkungan di Barito Utara dengan Panjang jalan lingkungan di Kabupaten Barito Utara 372.906,55 meter dengan Luas 1.287.106,05 M2.
4. Munculnya permukiman-permukiman baru sebagai dampak dari berkembangnya suatu daerah, mengakibatkan bertambahnya /muncul jalan lingkungan baru di Barito Utara yang perlu dilakukan peningkatan jalan.
5. Masih banyak masyarakat Barito Utara yang yang belum terjangkau fasilitas untuk ketersediaan air bersih dan air minum terutama di wilayah perdesaan.
6. Masih banyaknya terjadi kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berdampak belum pada belum optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi.
7. Mengembalikan bantaran dan tanggul sungai pada fungsinya semula sebagai upaya untuk meminimalisir berkurangnya areal terbuka hijau sepanjang jalur sungai.
8. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir selain menampung timbunan sampah, juga meminimalisasi bahaya akibat penimbunan sampah tersebut, baik secara fisik, kimia maupun biologi sehingga perlunya pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir yang layak, baik secara teknis maupun non teknis.
9. Menyediakan Ruang terbuka hijau publik dan fasilitas publik di wilayah strategis dan cepat tumbuh sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRWK.
10. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik untuk mendukung pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
11. Pentingnya segera mengesahkan Perda RTRW Kabupaten Barito Utara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis harus mengembangkan paradigma baru sesuai dengan tuntutan perubahan yang diamanatkan masyarakat maupun birokrat dalam rangka menjawab tuntutan reformasi. Sejalan dengan itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi kepada pelayanan yang baik, sehingga diperlukan :

- a. Koordinasi, Kerjasama dan Kebersamaan
Terjadinya koordinasi, kerjasama dan kebersamaan antara staf, antara instansi dan para stakeholders yang lain dalam pencapaian visi dan misi.
- b. Profesional dan Inovatif
Melaksanakan pengelolaan jalan/jembatan, sumber daya air secara profesional dan inovatif melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi.
- c. Efisien dan Efektif
Efisien dalam penggunaan waktu dan biaya, efektif dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan kebutuhan secara prioritas.
- d. Tanggung Jawab/ Akuntabilitas
Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus dipertanggungjawabkan.
- e. Disiplin dan Transparansi
Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian dan kesadaran serta tersosialisasikan secara transparan kepada masyarakat.

1. Visi Dinas Pekerjaan Umum

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat selalu konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka menggambarkan perwujudan terhadap keadaan yang diinginkan (dicita-citakan) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Prasarana Fisik yang handal, terintegrasi, berwawasan lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara ini, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut : **Terwujudnya** : mengandung makna bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara akan memenuhi dan mewujudkan kebutuhan dimasa sekarang dan mendatang. **Prasarana Fisik yang handal, terintegrasi, berwawasan lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat**: mengandung arti bahwa Dinas Pekerjaan Umum memberikan sesuatu pelayanan jaringan jalan dan jembatan, sumber daya air dan bangunan pengairan serta konservasi sungai, perumahan dan permukiman, fasilitas umum, penataan ruang dalam kondisi yang mantap dan handal (*berkualitas dengan spesifikasi bentuk-bentuk pelayanan dengan segala aspeknya secara terus menerus memberikan kepuasan*), merupakan satu kesatuan sistem pelayanan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dilaksanakan secara terus menerus guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

2. Misi Dinas Pekerjaan Umum

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal dengan baik instansi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dan mengetahui fungsi-fungsi pokok serta program-programnya serta hasil yang diinginkan dimasa yang akan datang.

Pernyataan misi merupakan pedoman tentang sasaran yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh organisasi serta memberikan petunjuk untuk mencapai tujuan sehingga efektif sebagai pengarah kebijakan yang harus diterima dan didukung pencapaiannya oleh stakeholders terkait, maka misi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui prasarana fisik yang handal, serta membuka keterisolasian wilayah ;
- b. Mewujudkan pendayagunaan sumber daya air dan pengairan yang layak/ terintegrasi;
- c. Mewujudkan prasarana transportasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat ;
- d. Mewujudkan prasarana dan sarana kota, permukiman, lingkungan dan fasilitas publik untuk mendukung laju pembangunan perkotaan/ perdesaan ;
- e. Mewujudkan pembangunan kawasan/ wilayah yang teratur dan seimbang.
- f. Meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang;

- g. Meningkatkan kondisi aset instansi untuk mampu meningkatkan sumber-sumber pendapat asli daerah dan menunjang pelaksanaan pembangunan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Kondisi infrastruktur saat ini di Kabupaten Barito Utara dirasakan sudah cukup membaik, akan tetapi infrastruktur yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi penopang bagi pembangunan sektor riil, mendorong sektor produksi dan pendukung pengembangan wilayah.

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai akhir yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Mengarah pada misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara yang telah diuraikan diatas, tujuan pembangunan sektor infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman di Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan.
5. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi.
6. Mewujudkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Keterkaitan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara terhadap tujuan pembangunan sektor infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman sebagaimana berikut :

Misi	Tujuan
• Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui prasarana fisik yang handal, serta membuka keterisolasian wilayah • Mewujudkan pendayagunaan sumber daya air dan pengairan yang layak/ terintegrasi • Mewujudkan prasarana transportasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat • Meningkatkan kondisi aset instansi untuk mampu meningkatkan sumber-sumber pendapat asli daerah dan menunjang pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan
Mewujudkan prasarana dan sarana kota, permukiman, lingkungan dan fasilitas publik untuk mendukung laju pembangunan perkotaan/ perdesaan	➤ Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi	Tujuan
	➤ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan
Mewujudkan pembangunan kawasan/ wilayah yang teratur dan seimbang	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan
Meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang	➤ Meningkatkan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi ➤ Mewujudkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	• Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan • Meningkatkan kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	• Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih • Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman • Meningkatkan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri
Meningkatkan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi	Terlaksananya peningkatan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi
Mewujudkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Terwujudnya peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien. Untuk dapat mendeteksi guna menentukan faktor-faktor penentu, secara internal faktor-faktor tersebut dilihat melalui pendekatan :

1. Kemampuan organisasi
2. Tugas pokok dan fungsi organisasi
3. Kondisi SDM
4. Kondisi data, studi dan informasi
5. Kemampuan penguasaan teknologi
6. Kemampuan dana
7. Etos kerja

Berdasarkan hasil pembahasan dan pernyataan isu-isu strategis dan telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal penyediaan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut:

Tabel 18. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara

Visi : Terwujudnya percepatan pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan menuju Kabupaten Barito Utara Yang Lestari dan Sejahtera			
Misi 1 : Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Melaksanakan peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah dan kelancaran transportasi	- Penyusunan dokumen perencanaan jalan dan jembatan diarahkan agar pembangunan fisik sesuai dengan kualitas yang dikehendaki - Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan diorientasikan untuk menghubungkan poros kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah - Peningkatan konstruksi jembatan menjadi betonisasi/rangka baja - Peningkatan drainase dan saluran pembuang daerah milik jalan untuk menjaga keberadaan jalan - Mempertahankan kondisi jalan tetap baik dengan memaksimalkan pemeliharaan - Penyusunan database jalan dan jembatan - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan (alat-alat berat dan fasilitas laboratorium) dalam rangka pemeliharaan jalan
	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik	Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan air baku, penanggulangan banjir, ketahanan pangan dan fasilitas publik	- Pengelolaan air baku diarahkan pada optimalisasi penggunaan air sungai dan mata air untuk pertanian dan bangunan air - Menyediakan dan meningkatkan sistem pengairan dengan memelihara daerah irigasi

			- Membangun jaringan irigasi baru terutama daerah yang potensi lahan pertanian cukup besar untuk mendukung ketahanan pangan - Pembangunan siring pengaman sungai dalam rangka meningkatkan kawasan rawan longsor. - Percepatan pengembangan kota di kawasan pengembangan baru dan kota-kota kecamatan serta kawasan cepat tumbuh
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan air bersih	- Meningkatkan pelayanan air bersih perkotaan dan perdesaan dengan mengelola air baku yang ada
	Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Melaksanakan pembangunan drainase dan sarana air limbah	- Mengembangkan sistem drainase perkotaan - Mengembangkan kinerja dalam pengelolaan air limbah
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman	- Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan diperkotaan dan perdesaan
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	Melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan keserasian tata ruang guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	- Percepatan penyusunan produk-produk tata ruang

Misi 3 : Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya kearah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal, nasional maupun global			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri	Peningkatan penataan/pemeliharaan ruang terbuka hijau dan sistem pengelolaan persampahan	- Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat - Meningkatkan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pada Ruang Terbuka Hijau - Meningkatkan sarana prasana pendukung dan petugas pengelolaan persampahan - Meningkatkan metode pengolahan sampah
Misi 4 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi	Terlaksananya peningkatan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi	Mengembangkan sumber daya manusia dan lembaga jasa konstruksi serta pengembangan data dan informasi	- Pengembangan jasa konstruksi yang profesional melalui pemantapan kelembagaan, peningkatan SDM di bidang jasa konstruksi - Penyediaan data yang akurat secara periodik dilakukan pemutakhiran data guna mendukung proses perencanaan dan evaluasi kinerja pelaku jasa konstruksi
Mewujudkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Terwujudnya peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Melibatkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	- Memelihara jaringan-jaringan jalan, jembatan dan irigasi melalui pola operasi dan pemeliharaan yang melibatkan swasta dan masyarakat

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan dan indikator kinerja secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan & Jembatan - Peningkatan/ Pembangunan Jalan (DAK) - Peningkatan Pembangunan Jalan (DAU) - Perencanaan pembangunan jalan - Pembangunan Jembatan - Perencanaan pembangunan jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan - Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan - Rehabilitasi jalan dan jembatan (DAK)	• Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik • Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik • Jumlah panjang jembatan dalam kondisi baik • Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	- Rehabilitasi jalan dan jembatan (DAU) - Pemeliharaan jalan dan jembatan Program Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah - Peningkatan jalan-jalan strategis kabupaten Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Workshop dan Alat Berat - Pemeliharaan alat-alat berat dan angkutan darat - Peningkatan sarana dan prasarana bengkel dan laboratorium teknik - Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop - Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel dan laboratorium	
Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) - Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun - Pemberdayaan petani pemakai air - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) - Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi Program Pengendalian Banjir - Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai - Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Pembangunan/peningkatan infrastruktur Program pembangunan Bangunan Gedung, Fasilitas Umum dan Sosial - Pembangunan bangunan gedung, fasilitas umum dan sosial Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAU) - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (DAK)	• Rasio jaringan irigasi • Prosentase pemeliharaan sungai • Jumlah fasilitas publik yang dibangun/ direhabilitasi • Jumlah lokasi strategis yang ditata • Prosentase fasilitasi dalam pembangunan infrastruktur perdesaan

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perdesaan - Penyediaan dan pengelolaan air bersih pedesaan (DAK) - Penyediaan dan pengelolaan air bersih pedesaan (DAU) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Pengembangan dan pengelolaan air minum dan air limbah - Pengembangan sistem distribusi air minum	• Jumlah prasarana air bersih pedesaan yang dibangun/ditingkatkan • Jumlah prasarana air bersih yang dibangun/direhab
Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan - Penyediaan sarana air limbah dan sanitasi dasar bagi masyarakat (DAK) - Penyediaan sarana air limbah dan sanitasi dasar bagi masyarakat (DAU) Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan - Penunjang Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Pengembangan dan pengelolaan air minum dan air limbah - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	• Prosentase rumah tinggal bersanitasi • Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab • Jumlah drainase yang dibangun/direhabilitasi
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman	Program Peningkatan /Rehabilitasi Sarana dan prasarana permukiman - Peningkatan/rehabilitasi prasarana dan sarana permukiman - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/direhabilitasi
Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan - Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang - Survey dan pemetaan - Pengembangan SDM, Data dan Sistem Informasi Penataan Ruang Program Pemanfaatan Ruang - Survey dan Pemetaan - Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan Pemanfaatan Ruang	• Jumlah produk tata ruang

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	- Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
Meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Penataan RTH - Pemeliharaan RTH Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Program Pengelolaan Persampahan - Pengelolaan persampahan dalam Kota Muara Teweh	• Prosentase penanganan sampah • Prosentase kualitas lingkungan perkotaan
Terlaksananya peningkatan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi	Program Pengaturan Jasa Konstruksi - Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait - Pengaturan dan penyelenggaraan IUJK	Prosentase pengaturan jasa konstruksi
Terwujudnya peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi - Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi Program Pelayanan Masyarakat - Penyusunan harga satuan upah dan barang - Pengelolaan laboratorium - Penelitian terhadap kontrak	Prosentase pemberdayaan jasa konstruksi

Sementara itu untuk uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada lampiran ***Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara.***

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan sebagaimana tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	46%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
	Panjang jalan dalam kondisi baik	253,30 km	350 km	360 km	380 km	400 km	425 km	425 km
	Panjang jembatan dalam kondisi baik	1.600 m	1.700 m	1.800 m	2.000 m	2.200 m	2.500 m	2.500 m
	Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	16 unit	16 unit	17 unit	18 unit	19 unit	20 unit	20 unit
Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik	Rasio Jaringan irigasi	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
	Prosentase pemeliharaan sungai	25%	35%	45%	55%	65%	75%	75%
	Jumlah fasilitas publik yang dibangun/ direhabilitasi	15 unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	16 unit
	Jumlah lokasi strategis yang ditata	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi
	Prosentase fasilitasi dalam pembangunan infrastruktur perdesaan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Jumlah sarana air bersih perdesaan yang dibangun/ ditingkatkan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	10 unit
	Jumlah prasarana air bersih yang dibangun/ direhab	53 buah	7 buah	8 buah	9 buah	10 buah	11 buah	45 buah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
Tersedia nya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	41,11%	41,64%	42,17%	42,71%	44,08%	46,39%	46,39%
	Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/ direhab	3 buah	2 buah	2 buah	2 buah	3 buah	3 buah	15 buah
	Jumlah drainase yang dibangun/ direhabilitasi	2.500 m	4.500 m	4.500 m	4.500 m	4.500 m	4.500 m	25.000 m
Meningkat nya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi	7.500 m	9.000 m	9.000 m	9.000 m	9.000 m	9.000 m	45.000 m
Tersedia nya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah produk tata ruang	3 buah	4 buah	6 buah	8 buah	10 buah	12 buah	12 buah
Meningkat nya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri	Prosentase penanganan sampah	81,25%	81,50%	81,70%	84,97%	89,87%	94,77%	94,77%
	Prosentase kualitas lingkungan perkotaan	90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%
Terlaksananya peningkatan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi	Prosentase pengaturan jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Prosentase pemberdayaan jasa konstruksi	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* dan merupakan suatu tujuan organisasi yang hendak dicapai.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas PU Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas PU Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan lingkungan memerlukan pengamatan yang cermat, khususnya kemungkinan-kemungkinan perubahannya untuk masa yang akan datang. Dengan perumusan Renstra, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan ikut mewarnai perubahan tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta sebagai acuan/pedoman penentuan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SKPD maupun di lingkup kabupaten.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara ini akan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya ***Kabupaten Barito Utara yang Lestari dan Sejahtera.***

Muara Teweh , 20 Oktober 2014

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Barito Utara,

H.FERY KUSMIADI, SE,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641124 198703 1 011

LAMPIRAN

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2013 –2018**

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
					BELANJA TIDAK LANGSUNG		132 Pegawai	132 Pegawai	7,712,394,044	134 Pegawai	8,483,633,448	135 Pegawai	9,331,996,793	136 Pegawai	10,265,196,473	137 Pegawai	11,291,716,120	137 Pegawai	47,084,936,878	DISPU	Kab. Barut
					BELANJA LANGSUNG																
Terwujudnya Pelayanan Perkantoran yang Optimal	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran		1.03.01. 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,610,673,750	100%	1,771,741,125	100%	1,948,915,238	100%	2,143,806,761	100%	2,358,187,437	100%	9,833,324,311	DISPU	
		Surat menyurat	1.03.01.01.01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditindaklanjuti	200 surat	200 surat	8,000,000	200 surat	8,800,000	200 surat	9,680,000	200 surat	9,680,000	200 surat	10,000,000	1.000 surat	46,160,000	DISPU	Kab. Barut
		Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	1.03.01.01.02.	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Jumlah tagihan rekening telpon, Internet ,dan air dan listrik dlm 1 tahun	4 rekening	4 rekening	217,200,000	4 rekening	304,962,375	4 rekening	355,000,000	4 rekening	405,000,000	4 rekening	450,000,000	4 rekening	1,732,162,375	DISPU	Kab. Barut
		Jasa jaminan barang milik daerah	1.03.01.01.05	3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah petugas jasa barang milik daerah	6 orang	6 orang	92,400,000	6 orang	92,400,000	6 orang	92,400,000	7 orang	108,000,000	7 orang	108,000,000	7 orang	493,200,000	DISPU	Kab. Barut
		Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.03.01.01.06.	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan perizinan	2 unit mobil dan 7 unit Kendaraan roda 2	2 unit mobil dan 8 unit Kendaraan roda 2	5,000,000	2 unit mobil dan 8 unit Kendaraan roda 2	5,000,000	2 unit mobil dan 10 unit Kendaraan roda 2	7,500,000	2 unit mobil dan 10 unit Kendaraan roda 2	7,500,000	2 unit mobil dan 12 unit Kendaraan roda 2	8,500,000	2 unit mobil dan 12 unit Kendaraan roda 2	33,500,000	DISPU	Kab. Barut
		Tenaga Administrasi Keuangan	1.03.01.01.07.	5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga administrasi keuangan	32 orang tenaga adm. keuangan	32 orang tenaga adm. keuangan	371,040,000	32 orang tenaga adm. keuangan	371,040,000	33 orang tenaga adm. keuangan	382,635,000	34 orang tenaga adm. keuangan	394,230,000	35 orang tenaga adm. keuangan	405,825,000	35 orang tenaga adm. keuangan	1,924,770,000	DISPU	Kab. Barut
		Tenaga Jasa kebersihan kantor	1.03.01.01.08	6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	7org	7org	91,000,000	7org	91,000,000	7org	91,000,000	7org	91,000,000	7org	91,000,000	7 org	455,000,000	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Alat tulis kantor	1.03.01.01.10.	7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan	37 macam	37 macam	80,793,750	37 macam	80,793,750	37 macam	80,809,738	37 macam	85,501,211	37 macam	96,762,437	185 macam	424,660,886	DISPU	Kab. Barut
		Barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.01.11.	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 macam	3 macam	69,050,000	3 macam	75,955,000	3 macam	83,550,500	3 macam	91,905,550	3 macam	105,000,000	25 macam	425,461,050	DISPU	Kab. Barut
		Komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	1.03.01.01.12.	9	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dan instalasi Listrik	2 macam	2 macam	7,400,000	2 macam	7,400,000	2 macam	7,400,000	2 macam	8,500,000	2 macam	8,500,000	2 macam	39,200,000	DISPU	Kab. Barut
		Peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.01.13	10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumah peralatan dan perlengkapan kantor	22 macam	22 macam	11,990,000	22 macam	11,990,000	22 macam	11,990,000	22 macam	11,990,000	25 macam	19,000,000	25 macam	66,960,000	DISPU	Kab. Barut
		Bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan	1.03.01.01.15.	11	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja bhn bacaan (Surat kabar/ Majalah)	2 jenis	2 jenis	49,500,000	2 jenis	69,500,000	2 jenis	76,450,000	2 jenis	90,000,000	2 jenis	100,000,000	2 jenis	385,450,000	DISPU	Kab. Barut
		Bahan logistik kantor	1.03.01.01.16.	12	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan/ material utk kegiatan tertentu	-	-	0	1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	75,000,000	1 kegiatan	100,000,000	1 kegiatan	255,000,000	DISPU	Kab. Barut
		Makanan dan minuman	1.03.01.01.17.	13	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman kantor	2 macam	2 macam	48,000,000	2 macam	48,000,000	2 macam	50,000,000	2 macam	55,000,000	2 macam	65,000,000	2 macam	266,000,000	DISPU	Kab. Barut
		Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	1.03.01.01.18.	14	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	prosentase perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsult keluar daerah	100%	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%	495,000,000	100%	544,500,000	100%	2,289,500,000	DISPU	Prov/ Kab di Kalteng dan Prov/ Kab Diluar Kalteng
		Tenaga non PNS/ Honorer	1.03.01.01.19.	15	Penyediaan Jasa Non PNS/ Honorer	Jumlah tenaga non PNS/ Honorer	6 orang	6 orang	59,300,000	7orang	74,900,000	8 orang	90,500,000	8 orang	90,500,000	9 orang	106,100,000	9 orang	421,300,000	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Rapat-rapat koordinasi & konsultasi kedalam daerah	1.03.01.01.24.	16	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi kedalam daerah	Prosentase perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsult dalam daerah	85%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	125,000,000	100%	140,000,000	100%	575,000,000	DISPU	Kab. Barut
		Sarana dan prasarana kantor	1.03.01.02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase produktifitas aparat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	Sarana prasarana yg ada	100%	1,266,534,264	100%	1,393,187,690	100%	1,532,506,459	100%	1,685,757,105	100%	1,854,332,816	100%	7,732,318,334		Kab. Barut
		gedung kantor	1.03.01.02.03.	1	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung baru yang dibangun	-	-	0	-	0	1 unit gudang	300,000,000	-	0	-	0	1 unit gudang	300,000,000	DISPU	Kab. Barut
		Perlengkapn Gedung Kantor	1.03.01.02.07.	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	3 macam	2 macam	39,340,000	2 macam	45,000,000	3macam	50,000,000	6 macam	100,000,000	6 macam	100,000,000	6 macam	334,340,000	DISPU	Kab. Barut
		Peralatan Gedung Kantor	1.03.01.02.09.	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	-	1 macam	1,500,000	1 macam	2,000,000	1 macam	2,000,000	5 macam	100,000,000	5 macam	100,000,000	5 macam	205,500,000	DISPU	Kab. Barut
		Mebeleur kantor	1.03.01.02.10.	4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur	1 macam	5 macam	81,860,000	5 macam	95,000,000	5 macam	95,000,000	5 macam	95,000,000	5 macam	95,000,000	5 macam	461,860,000	DISPU	Kab. Barut
		komputer dan perlengkapannya	1.03.01.02.11.	5	Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapannya	10 macam	10 macam	235,430,000	10 macam	261,187,690	10 macam	250,506,459	10 macam	300,757,105	10 macam	350,000,000	10 macam	1,397,881,254	DISPU	Kab. Barut
		Taman dan halaman kantor	1.03.01.02.15.	6	Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	Jumlah fasilitas terbangun pada taman dan halaman kantor	-	-	0	-	0	1 unit gapura	170,000,000	1 paket paving halaman	300,000,000	1 paket paving halaman , 1 paket tempat parkir	380,000,000	2 paket paving halaman , 1 paket tempat parkir	850,000,000	DISPU	Kab. Barut
		Alat-lata studio	1.03.01.02.19	7	Pengadaan alat-alat studio	Jumlah alat-alat studio	2 macam	1 macam	15,420,000	2 macam	20,000,000	2 macam	20,000,000	2 macam	20,000,000	3 macam	50,000,000	3 macam	125,420,000	DISPU	Kab. Barut
		gedung kantor	1.03.01.02.22.	8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	prosentase pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	-	-	0	100%	50,000,000	100%	25,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	175,000,000	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Kendaraan Dinas/Operasional	1.03.01.02.24.	9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend. Dinas/Opr	prosentase pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas/operasional	90%	90%	60,000,000	90%	70,000,000	90%	70,000,000	90%	70,000,000	90%	79,332,816	90%	349,332,816	DISPU	Kab. Barut
		Perlengkapan Gedung Kantor	1.03.01.02.26.	10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase perlengkapan Gedung kantor	90%	90%	45,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	245,000,000	DISPU	Kab. Barut
		gedung kantor	1.03.01.02.42.	11	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	jumlah gedung yang di rehabilitasi	1 unit	1 unit	762,984,264	1 unit (lanjutan)	800,000,000	1 unit (lanjutan)	500,000,000	1 unit (baru)	600,000,000	1 unit (baru)	600,000,000	3 unit	3,262,984,264	DISPU	Kab. Barut
		rumah kepala dinas	1.03.01.02.45	12	Penyediaan sewa rumah kepala dinas	jumlah rumah yang disewa	1 unit	1 unit	25,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 unit	25,000,000	DISPU	Kab. Barut
		Aparatur di jajaran Badan PMD	1.03.01.03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase disiplin aparatur terhadap pelayanan	100%	100%	97,500,000	100%	107,250,000	100%	117,975,000	100%	129,772,500	100%	142,749,750	100%	595,247,250	DISPU	Kab. Barut
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	1.03.01.03.02.	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	150 stel PDH dan 150 stel pakaian Olah Raga	97,500,000	150 stel Pakaian Linmas	60,000,000	-	0	155 stel PDH	62,000,000	160 stel Pakaian Linmas + topi	70,400,000	PDH, Pakaian Olah Raga, Pakaian Linmas	289,900,000	DISPU	Kab. Barut
		Pengadaan Pakaian KORPRI	1.03.01.03.04	2	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI	-	-	0	-	0	150 stel Baju Korpri + celana	60,000,000	-	0	-	0	150 stel Baju Korpri + celana	60,000,000	DISPU	Kab. Barut
		Pakaian Dinas Hari-hari tertentu	1.03.01.03.05.	3	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari tertentu	-	-	0	150 stel Batik	47,250,000	150 stel Pakaian Olah Raga	57,975,000	155 stel Batik + celana	67,772,500	160 stel Pakaian Olah Raga	72,349,750	Pakaian Batik, Pakaian Olah Raga	245,347,250	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Sumber daya aparatur	1.03.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase kualitas aparat dalam menunjang pelayanan	75%	80%	421,000,000	85%	463,100,000	90%	509,410,000	100%	560,351,000	100%	616,386,100	100%	2,570,247,100	DISPU	Kab. Barut
		Sumber daya aparatur	1.03.01.05.02	1.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prosentase pelaksanaan sosialisasi	75%	75%	21,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	75%	21,000,000	DISPU	Kab. Barut
		Sumber daya aparatur	1.03.01.05.03.	1.	Bimbingan teknis imlementasi peraturan perundang-undangan	Prosentase pelaksanaan / mengikuti bimbingan teknis	80%	80%	400,000,000	85%	463,100,000	90%	509,410,000	100%	560,351,000	100%	616,386,100	100%	2,549,247,100	DISPU	Kab. Barut
									0		0		0		0		0				
		Dokumen pelaporan kinerja	1.03.01.06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tingkat kualitas laporan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	79,862,500	100%	87,848,750	100%	96,633,625	100%	106,296,988	100%	116,926,686	100%	487,568,549	DISPU	Kab. Barut
		Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.03.01.06.01.	1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	5,500,000	1 laporan	6,050,000	1 laporan	6,655,000	1 laporan	7,320,500	1 laporan	8,052,550	5 laporan	33,578,050	DISPU	Kab. Barut
		Pelaporan keuangan semesteran	1.03.01.06.02.	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 laporan	2 laporan	4,500,000	2 laporan	4,950,000	2 laporan	5,445,000	2 laporan	5,989,500	2 laporan	6,588,450	10 laporan	27,472,950	DISPU	Kab. Barut
		Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.03.01.06.03.	3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	2 laporan	2 laporan	4,500,000	2 laporan	4,950,000	2 laporan	5,445,000	2 laporan	5,989,500	2 laporan	6,588,450	10 laporan	27,472,950	DISPU	Kab. Barut
		pelaporan keuangan akhir tahun	1.03.01.06.04.	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	4,500,000	1 laporan	4,950,000	1 laporan	5,445,000	1 laporan	5,989,500	1 laporan	6,588,450	5 laporan	27,472,950	DISPU	Kab. Barut
		RKA-SKPD dan DPA-SKPD	1.03.01.06.05.	5	Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	10,000,000	4 dokumen	11,000,000	4 dokumen	12,100,000	4 dokumen	13,310,000	4 dokumen	14,641,000	20 dokumen	61,051,000	DISPU	Kab. Barut
		LAKIP SKPD	1.03.01.06.07.	6	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan LAKIP	1 laporan	1 laporan	7,500,000	1 laporan	8,250,000	1 laporan	9,075,000	1 laporan	9,982,500	1 laporan	10,980,750	5 laporan	45,788,250	DISPU	Kab. Barut
		Laporan monitoring DAK	1.03.01.06.08.	7	Penyusunan laporan e-monitoring DAK	Jumlah Laporan monitoring DAK	-	1 laporan	43,362,500	1 laporan	47,698,750	1 laporan	52,468,625	1 laporan	57,715,488	1 laporan	63,487,036	5 laporan	264,732,399	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Mewujudkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Terwujudnya peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Tingkat kualitas pelayanan masyarakat dan mitra kerja	1.03.01.07.		Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase fasilitasi dan peran aktif swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur	100%	100%	40,125,000	100%	44,137,500	100%	48,551,250	100%	53,406,375	100%	58,747,013	100%	244,967,138	DISPU	Kab. Barut
		Harga satuan upah dan barang	1.03.01.07.02	1	Penyusunan harga satuan upah dan barang	Jumlah buku Harga satuan upah dan barang	2 buku	2 buku	13,425,000	2 buku	14,767,500	2 buku	16,244,250	2 buku	17,868,675	2 buku	19,655,543	10 buku	81,960,968	DISPU	Kab. Barut
		Pelayanan laboratorium	1.03.01.07.03	2	Pengelolaan Laboratorium	Prosentase layanan laboratorium	95%	95%	13,350,000	95%	14,685,000	95%	16,153,500	95%	17,768,850	95%	19,545,735	95%	81,503,085	DISPU	Kab. Barut
		Kontrak pekerjaan	1.03.01.07.04	3	Penelitian terhadap kontrak	Prosentase penelitian terhadap kontrak'	95%	95%	13,350,000	95%	14,685,000	95%	16,153,500	95%	17,768,850	95%	19,545,735	95%	81,503,085	DISPU	Kab. Barut
Meningkatkan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi	Terlaksananya peningkatan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi	Tingkat SDM di bidang ke-PU-an dan Penyedia Jasa konstruksi	1.03.01.31.		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Prosentase Pengaturan Jasa Konstruksi	100%	100%	65,000,000	100%	71,500,000	100%	78,650,000	100%	86,515,000	100%	95,166,500	100%	396,831,500	DISPU	Kab. Barut , provinsi dan pusat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1.03.01.31.01	1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Jumlah peraturan yang di sosialisasikan	1 peraturan	1 peraturan	46,836,000	1 peraturan	51,519,600	1 peraturan	56,671,560	1 peraturan	62,338,716	5 peraturan	68,572,588	1 peraturan	285,938,464	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.31.02	2	Pengaturan dan penyeleng garaan IUJK	Prosentase penerbitan IUJK	60%	65%	18,164,000	70%	19,980,400	70%	21,978,440	75%	24,176,284	80%	26,593,912	80%	110,893,036	DISPU	Kab. Barut , provinsi dan pusat
Mewujud kan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Terwujud nya peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Prosentase fasilitasi dan peran aktif swasta dan masyarakat thd pembangu nan infrastruktur	1.03.01.32.		Program Pemeberdayaan Jasa Kontruksi	Prosentase pemberdayaan jasa konstruksi	50%	55%	70,000,000	60%	77,000,000	65%	84,700,000	70%	93,170,000	75%	102,487,000	75%	427,357,000	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.32.01	1	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi	Prosentase pemberdayaan jasa konstruksi	50%	55%	70,000,000	60%	77,000,000	65%	84,700,000	70%	93,170,000	75%	102,487,000	75%	427,357,000	DISPU	Kab. Barut
Mening katkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukima n untuk meningkatk an pertumbuh an ekonomi dan ketahanan pangan	Meningkat nya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	1.03.01.15		Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan & Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	46.00%	50.00%	76,659,900,143	55.00%	84,325,890,157	60.00%	92,758,479,173	65.00%	102,034,327,090	70.00%	112,237,759,799	70.00%	468,016,356,363	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1.03.01,15.01	1	Peningkatan/ pembangunan jalan (DAK)	panjang jalan dalam kondisi baik	253,30 Km	350 Km	8,787,770,000	360 Km	9,227,158,500	380 Km	9,688,516,425	400 Km	10,172,942,246	425 Km	10,681,589,359	425 Km	48,557,976,530	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01,15.02	2	Peningkatan/ pembangunan jalan (DAU)	panjang jalan dalam kondisi baik	253,30 Km	350 Km	57,021,490,637	360 Km	62,518,731,657	380 Km	69,276,962,748	400 Km	76,734,084,844	425 Km	84,961,140,441	425 Km	350,512,410,327	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01,15.06	3	Pembangunan jembatan	panjang jembatan dalam kondisi baik	1.600 m	1.700 m	10,850,639,506	1.800 m	12,130,000,000	2.000 m	13,343,000,000	2.200 m	14,677,300,000	2.500 m	16,145,030,000	2.500 m	67,145,969,506	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01,15.21	4	Perencanaan peningkatan/ pembangunan jalan	prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	65%	-	0	65%	250,000,000	70%	250,000,000	75%	250,000,000	80%	250,000,000	80%	1,000,000,000	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01,15.22	5	Perencanaan peningkatan/ pembangunan jembatan	prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	75%	-	0	75%	200,000,000	80%	200,000,000	80%	200,000,000	85%	200,000,000	85%	800,000,000	DISPU	Kab. Barut
									0		0		0		0		0		0		
- sda -	- sda -	- sda -	1.03.01.18		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	46.00%	50.00%	18,846,529,137	55.00%	20,731,182,051	60.00%	22,804,300,256	65.00%	25,084,730,281	70.00%	27,593,203,309	70.00%	115,059,945,034	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.18.06	1	Rehabilitasi Jalan dan jembatan	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	46.00%	50.00%	18,846,529,137	55.00%	19,431,182,051	60.00%	21,254,300,256	65.00%	23,334,730,281	70.00%	25,593,203,309	70.00%	108,459,945,034	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.18.07	2	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	-	-	0	75%	200,000,000	75%	300,000,000	80%	350,000,000	80%	350,000,000	80%	1,200,000,000	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.18.08	3	Rehabilitasi jalan dan jembatan (DAK)	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik													0	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.18.09	4	Rehabilitasi jalan dan jembatan (DAU)	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik													0	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.18.10	5	Pemeliharaan jalan dan jembatan (UPR)	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	-	-	0	55.00%	1,100,000,000	60.00%	1,250,000,000	65.00%	1,400,000,000	70.00%	1,650,000,000	70.00%	5,400,000,000	DISPU	Kab. Barut
- sda -	- sda -	- sda -	1.03.01.14		Program Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	46.00%	50.00%	660,261,000	55.00%	726,287,100	60.00%	798,915,810	65.00%	878,807,391	70.00%	966,688,130	70.00%	4,030,959,431	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.14.21	1	Peningkatan jalan- jalan strategis kabupaten	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	46.00%	50.00%	660,261,000	55.00%	726,287,100	60.00%	798,915,810	65.00%	878,807,391	70.00%	966,688,130	70.00%	4,030,959,431	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
- sda -	- sda -	Sarana prasarana dan peralatan kebina margaan dalam kondisi baik	1.03.01.39		Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Workshop dan Alat Berat	Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebina margaan dalam kondisi baik	16 unit	16 unit	1,030,000,000	17 unit	1,133,000,000	18unit	1,246,300,000	19 unit	1,370,930,000	20 unit	1,508,023,000	20 unit	6,288,253,000	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.39.01	1	Pemeliharaan alat-alat berat dan angkutan darat	prosentase pemeliharaan alat-alat berat dan angkutan darat	75%	75%	800,500,000	80%	880,550,000	80%	968,605,000	85%	1,065,465,500	85%	1,172,012,050	85%	4,887,132,550	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.39.02	2	Rehabilitasi/ pemeliharaan gedung workshop	prosentase rehab/pemeliharaan gedung workshop	75%	75%	93,550,000	80%	102,905,000	80%	113,195,500	85%	124,515,050	85%	136,966,555	85%	571,132,105	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.39.03	3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel dan laboratorium	prosentase pengadaan peralatan /perlengkapan bengkel dan laboratorium	85%	85%	135,950,000	85%	149,545,000	85%	164,499,500	90%	180,949,450	90%	199,044,395	90%	829,988,345	DISPU	Kab. Barut
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik	Jaringan Irigasi dan rawa dalam kondisi baik	1.03.01.24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	40%	50%	3,683,155,122	60%	4,051,470,634	70%	4,456,617,698	80%	4,902,279,467	90%	5,392,507,414	90%	22,486,030,335	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.24.10	1	Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	Jumlah irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	4.000 m	400 m	1,477,900,000	400 m	1,551,795,000	400 m	1,629,384,750	400 m	1,710,853,988	400 m	1,796,396,687	6.000 m	8,166,330,424	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.24.15	2	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	4.000 m	400 m	380,000,000	400 m	418,000,000	400 m	459,800,000	400 m	505,780,000	400 m	556,358,000	6.000 m	2,319,938,000	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.24.16	3	Pemberdayaan petani pemakai air	prosentase pemberdayaan petani pemakai air	80%	80%	175,000,000	80%	192,500,000	80%	211,750,000	80%	232,925,000	80%	256,217,500	80%	1,068,392,500	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1.03.01.24.22	4	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)	Jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan	4.000 m	400 m	1,650,255,122	400 m	1,789,175,634	400 m	1,996,808,698	400 m	2,196,489,567	400 m	2,416,138,524	6.000 m	10,048,867,545	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.24.23	5	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	95%	-	0	100%	100,000,000	100%	158,874,250	100%	256,230,912	100%	367,396,703	100%	882,501,866	DISPU	Kab. Barut
- sda -	- sda -	Terpeliharanya Sungai di Barito Utara	1.03.01.28		Program Pengendalian Banjir	Prosentase pemeliharaan sungai	25%	35%	3,520,000,000	45%	3,872,000,000	55%	4,259,200,000	65%	4,685,120,000	75%	5,153,632,000	75%	21,489,952,000	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.28.03	1	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Prosentase pemeliharaan sungai	25%	35%	2,450,000,000	45%	2,695,000,000	55%	2,964,500,000	65%	3,260,950,000	75%	3,587,045,000	75%	14,957,495,000	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.28.07	2	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Prosentase pemeliharaan sungai	25%	35%	1,070,000,000	45%	1,177,000,000	55%	1,294,700,000	65%	1,424,170,000	75%	1,566,587,000	75%	6,532,457,000	DISPU	Kab. Barut
- sda -	- sda -	Tertatanya lokasi-lokasi strategis	1.03.01.29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah lokasi strategis yang ditata	1 lokasi	2 lokasi	2,009,325,000	2 lokasi	2,210,257,500	2 lokasi	2,431,283,250	2 lokasi	2,674,411,575	2 lokasi	2,941,852,733	2 lokasi	12,267,130,058	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.29.02	1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah lokasi strategis yang ditata	1 lokasi	2 lokasi	2,009,325,000	2 lokasi	2,210,257,500	2 lokasi	2,431,283,250	2 lokasi	2,674,411,575	2 lokasi	2,941,852,733	2 lokasi	12,267,130,058	DISPU	Kab. Barut
- sda -	- sda -	Tersedianya bangunan gedung, fasilitas umum dan sosial	1.03.01.37		Program pembangunan Bangunan Gedung, Fasilitas Umum dan Sosial	Jumlah fasilitas publik yang dibangun/direhabilitasi	15 unit	4 unit	1,457,000,000	3 unit	1,602,700,000	3 unit	1,762,970,000	3 unit	1,939,267,000	3 unit	2,133,193,700	16 unit	8,895,130,700	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.37.03	1	Pembangunan bangunan gedung, fasilitas umum dan sosial	Jumlah fasilitas publik yang dibangun/direhabilitasi	15 unit	4 unit	1,457,000,000	3 unit	1,602,700,000	3 unit	1,762,970,000	3 unit	1,939,267,000	3 unit	2,133,193,700	16 unit	8,895,130,700	DISPU	Kab. Barut
- sda -	- sda -	Terlaksananya Monev dan pelaporan PPIP	1.03.01.30		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase fasilitasi dalam pembangunan infrastruktur perdesaan	50%	55%	150,000,000	60%	165,000,000	65%	181,500,000	70%	199,650,000	75%	219,615,000		915,765,000	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1.03.01.30.08	1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase fasilitasi dalam pembangunan infrastruktur perdesaan	50%	55%	150,000,000	60%	165,000,000	65%	181,500,000	70%	199,650,000	75%	219,615,000	75%	915,765,000	DISPU	Kab. Barut
				2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan																
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih	Tersedianya sarana air bersih	1.03.01.35		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perdesaan	Jumlah Sarana air bersih perdesaan yang dibangun/ditingkatkan	2 unit	2 unit	1,347,437,940	2 unit	1,482,181,734	2 unit	1,630,399,907	2 unit	1,793,439,898	2 unit	1,972,783,888	10 unit	8,226,243,367	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.35.03	1	Penyediaan dan pengelolaan air bersih pedesaan (DAK)	Jumlah Sarana air bersih perdesaan yang dibangun/ditingkatkan	2 unit	2 unit	1,070,000,000	2 unit	1,177,000,000	2 unit	1,294,700,000	2 unit	1,424,170,000	2 unit	1,566,587,000	12 unit	6,532,457,000	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.35.04	2	Penyediaan dan pengelolaan air bersih pedesaan (DAU)	Jumlah Sarana air bersih perdesaan yang dibangun/ditingkatkan	2 unit	2 unit	277,437,940	2 unit	305,181,734	2 unit	335,699,907	2 unit	369,269,898	2 unit	406,196,888	12 unit	1,693,786,367	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana air limbah	1.04.01.16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	41.11%	41.64%	1,208,875,650	42.17%	1,329,763,215	42.71%	1,462,739,537	44.08%	1,609,013,490	46.39%	1,769,914,839	46.39%	7,380,306,731	DISPU	Kab. Barut
			1.04.01.16.10	1	Penyediaan sarana air limbah dan sanitasi dasar bagi masyarakat (DAK)	Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab	3 buah	2 buah	1,005,690,000	2 buah	1,106,259,000	2 buah	1,216,884,900	3 buah	1,338,573,390	3 buah	1,472,430,729	15 buah	6,139,838,019	DISPU	Kab. Barut
			1.04.01.16.11	2	Penyediaan sarana air limbah dan sanitasi dasar bagi masyarakat (DAU)	Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab	3 buah	2 buah	203,185,650	2 buah	223,504,215	2 buah	245,854,637	3 buah	270,440,100	3 buah	297,484,110	15 buah	1,240,468,712	DISPU	Kab. Barut
- sda -	- sda -	Tersedianya laporan pelaksanaan PPSP	1.04.01.22		Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Jumlah laporan dari kelompok kerja	-	2 laporan	150,000,000	2 laporan	165,000,000	2 laporan	181,500,000	2 laporan	199,650,000	2 laporan	219,615,000	10 laporan	915,765,000	DISPU	Kab. Barut
			1.04.01.22.01	1	Penunjang Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Jumlah laporan dari kelompok kerja	-	2 laporan	150,000,000	2 laporan	165,000,000	2 laporan	181,500,000	2 laporan	199,650,000	2 laporan	219,615,000	10 laporan	915,765,000	DISPU	Kab. Barut
- sda -	- sda -	Tersedianya sarana prasarana air bersih dan air limbah	1.03.01.27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				3,183,900,000		3,502,290,000		3,852,519,000		4,237,770,900		4,661,547,990		19,438,027,890	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.27.12	1	Pengembangan dan pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah prasarana air bersih yang dibangun/direhab dan	53 buah	7 buah	3,183,900,000	8 buah	3,502,290,000	9 buah	3,852,519,000	10 buah	4,237,770,900	11 buah	4,661,547,990	45 buah	19,438,027,890	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah drainase yang dibangun/direhabilitasi	2.500 meter	4.500 meter		4.500 meter		4.500 meter		4.500 meter		4.500 meter		25.000 meter			
				3	Pengembangan sistem distribusi air minum																
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana permukiman	1.03.01.36		Program Peningkatan /Rehabilitasi Sarana dan prasarana pemukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/direhabilitasi	7.500 meter	900 meter	7,277,000,000	900 meter	8,004,700,000	900 meter	8,805,170,000	900 meter	9,685,687,000	900 meter	10,654,255,700	12.000 meter	44,426,812,700	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.36.03	1	Peningkatan/rehabilitasi prasarana dan sarana permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/direhabilitasi	7.500 meter	900 meter	7,277,000,000	900 meter	8,004,700,000	900 meter	8,805,170,000	900 meter	9,685,687,000	900 meter	10,654,255,700	12.000 meter	44,426,812,700	DISPU	Kab. Barut
				2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman																
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	Tersedianya produk-produk tata ruang	1.05.01.15		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah produk tata ruang	3 buah	4 buah	1,132,500,000	6 buah	1,245,750,000	8 buah	1,370,325,000	10 buah	1,507,357,500	12 buah	1,658,093,250	12 buah	6,914,025,750	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1.05.01.15.06	1	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan				458,233,600		504,056,960		554,462,656		609,908,922		670,899,814		2,797,561,951	DISPU	Kab. Barut
			1.05.01.15.10	2	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang				120,597,400		132,657,140		145,922,854		160,515,139		176,566,653		736,259,187	DISPU	Kab. Barut
			1.05.01.15.13	3	Survey dan pemetaan				351,263,500		386,389,850		425,028,835		467,531,719		514,284,890		2,144,498,794	DISPU	Kab. Barut
			1.05.01.15.16	4	Pengembangan SDM, Data dan Sistem Informasi Penataan Ruang				202,405,500		222,646,050		244,910,655		269,401,721		296,341,893		1,235,705,818	DISPU	Kab. Barut
- sda -	- sda -	Tersedianya produk-produk tata ruang			Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah produk tata ruang	-	-	0		160,000,000		176,000,000		193,600,000		212,960,000		742,560,000	DISPU	Kab. Barut
- sda -	- sda -	Tersedianya produk-produk tata ruang			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah produk tata ruang	-	-	0		275,000,000		302,500,000		332,750,000		366,025,000		1,276,275,000		
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri		1.08.01.24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase kualitas lingkungan perkotaan	90%	90%	4,279,308,000	90%	4,707,238,800	90%	5,177,962,680	95%	5,695,758,948	95%	6,265,334,843	`	26,125,603,271	DISPU	Kab. Barut
			1.08.01.24.05	1	Penataan RTH	Jumlah petugas pemeliharaan RTH	35 org	35 org	2,684,370,000	37 org	2,952,807,000	37 org	3,248,087,700	41 org	3,572,896,470	`	3,930,186,117	43 org	16,388,347,287	DISPU	Kab. Barut
			1.08.01.24.06	2	Pemeliharaan RTH	Jumlah petugas pemeliharaan RTH	35 org	35 org	1,594,938,000	37 org	1,754,431,800	37 org	1,929,874,980	41 org	2,122,862,478	43 org	2,335,148,726	43 org	9,737,255,984	DISPU	Kab. Barut
- sda -	- sda -	Tersedinaya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.08.01.15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah	81.25%	81.50%	2,690,330,325	81.70%	2,959,363,358	84.97%	3,255,299,692	89.87%	3,580,829,663	94.77%	3,938,912,629	94.77%	16,424,735,666	DISPU	Kab. Barut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog dan Kegiatan		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1.08.01.15.02	1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah peralatan pengelolaan persampahan yang dalam kondisi baik	12 unit	12 unit	2,690,330,325	14 unit	2,959,363,358	16 unit	3,255,299,692	18 unit	3,580,829,663	20 unit	3,938,912,629	20 unit	16,424,735,666	DISPU	Kab. Barut
- sda -	- sda -	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	1.03.01.38		Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah	81.25%	81.50%	3,146,036,675	81.70%	3,460,640,343	84.97%	3,806,704,377	89.87%	4,187,374,814	94.77%	4,606,112,296	94.77%	19,206,868,505	DISPU	Kab. Barut
			1.03.01.38.01	1	Pengelolaan persampahan dalam Kota Muara Teweh	Prosentase penanganan sampah	81.25%	81.50%	3,146,036,675	81.70%	3,460,640,343	84.97%	3,806,704,377	89.87%	4,187,374,814	94.77%	4,606,112,296	94.77%	19,206,868,505	DISPU	Kab. Barut
									136,082,254,506		150,125,479,957		165,138,027,953		181,651,830,746		199,817,013,822		832,814,606,984		